



DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS DAGING SAPI INDONESIA TAHUN 2018



DISTRIBUSI
PERDAGANGAN KOMODITAS
DAGING SAPI
INDONESIA TAHUN 2018

<https://www.scribd.com/document/381111111>



Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Sapi di Indonesia 2018

Trade flow of beef commodity in Indonesia 2018

ISBN : 978-602-438-261-2

No. Publikasi/Publication Number: 06130.1906

Katalog/Catalog: 8201005

Ukuran Buku/Book Size: 16,5 X 24 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xii + 86 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Penyunting/Editor:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Penerbit/Published by:

© **BPS RI/BPS-Statistics Indonesia**

Pencetak/Printed by:

CV. DHARMAPUTRA

Sumber Ilustrasi/Graphics by: -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all
this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics
Indonesia*

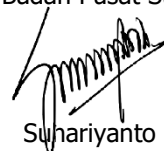
KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Sapi Indonesia tahun 2018 merupakan salah satu dari 8 jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia tahun 2018 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditas daging sapi yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan, Margin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik



Suhariyanto

<https://www.bps.go.id>

ABSTRAKSI

Daging sapi merupakan komoditas dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, produksi daging sapi dalam negeri cenderung mengalami peningkatan. Namun, kapasitas produksi tersebut belum cukup untuk mengimbangi konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia yang juga kian meningkat cukup signifikan. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi ini menyebabkan harga salah satu sumber protein hewani ini menjadi cukup tinggi terutama pada saat menjelang hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri.

Terkait hal di atas, salah satu fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah bagaimana memangkas rantai distribusi kebutuhan pangan agar lebih efisien. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mempertahankan ketersediaan dan stabilitas harga pangan agar tetap terjangkau. Oleh karena itu, pada 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Sapi guna mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

Publikasi ini menganalisa pola distribusi perdagangan hasil dari Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Sapi di 34 ibukota provinsi dan 207 kabupaten/kota potensi terpilih. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan sampel pedagang, diperoleh informasi mengenai gambaran pola distribusi komoditas daging sapi dan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) total baik secara nasional maupun provinsi.

Hasil survei menunjukkan bahwa pola utama distribusi daging sapi di Indonesia memiliki dua jalur, yaitu jalur produsen dan jalur importir. Untuk jalur produsen, pola utama distribusi daging sapi memiliki tiga rantai yaitu: produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Begitu pula untuk jalur importir, pola utama distribusi daging sapi memiliki tiga rantai yaitu: importir – distributor – pedagang eceran – konsumen akhir. Dalam skala nasional, perolehan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) total adalah 34,11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 34,11 persen.

kata kunci: *daging sapi, pola distribusi, margin*

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan Survei	2
BAB II METODOLOGI	3
2.1 Ruang Lingkup	3
2.2 Kerangka Sampel	4
2.3 Metode Pemilihan Sampel	4
2.4 Metode Pengumpulan Data	4
2.5 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) .	5
2.6 Konsep dan Definisi	6
2.7 Penjelasan Grafik Pola Distribusi	10
BAB III ULASAN RINGKAS	13
3.1 Gambaran Umum	13
3.2 Indonesia	15
3.3 Provinsi Aceh	22
3.4 Provinsi Sumatera Utara	24
3.5 Provinsi Sumatera Barat.....	26
3.6 Provinsi Riau	27
3.7 Provinsi Jambi	29
3.8 Provinsi Sumatera Selatan.....	30
3.9 Provinsi Bengkulu	32
3.10 Provinsi Lampung	33
3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	34

3.12	Provinsi Kepulauan Riau.....	36
3.13	Provinsi DKI Jakarta	38
3.14	Provinsi Jawa Barat	40
3.15	Provinsi Jawa Tengah	42
3.16	Provinsi D.I. Yogyakarta	43
3.17	Provinsi Jawa Timur	45
3.18	Provinsi Banten	47
3.19	Provinsi Bali	48
3.20	Provinsi Nusa Tenggara Barat	50
3.21	Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	51
3.22	Provinsi Kalimantan Barat	53
3.23	Provinsi Kalimantan Tengah	54
3.24	Provinsi Kalimantan Selatan	56
3.25	Provinsi Kalimantan Timur.....	57
3.26	Provinsi Kalimantan Utara	59
3.27	Provinsi Sulawesi Utara.....	61
3.28	Provinsi Sulawesi Tengah.....	62
3.29	Provinsi Sulawesi Selatan	63
3.30	Provinsi Sulawesi Tenggara.....	65
3.31	Provinsi Gorontalo	67
3.32	Provinsi Sulawesi Barat.....	69
3.33	Provinsi Maluku	70
3.34	Provinsi Maluku Utara	72
3.35	Provinsi Papua Barat.....	73
3.36	Provinsi Papua	75
BAB IV	KESIMPULAN	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Flowchart Penentuan Pelaku Usaha	8
Gambar 2. Sentra Produksi Daging Sapi di Indonesia, 2017	13
Gambar 3. Peta Sebaran Produksi Daging Sapi di Indonesia, 2017	14
Gambar 4. Impor Daging Sapi Menurut Negara Asal (Ton), 2017.....	14
Gambar 5. Pelaku Usaha Komoditas Daging Sapi Indonesia	16
Gambar 6. Pelaku Usaha Komoditas Daging Sapi Indonesia menurut Status Badan Usaha (persen)	16
Gambar 7. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi Indonesia	18
Gambar 8. Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total Daging Sapi Tingkat Provinsi (persen).....	21
Gambar 9. Persentase MPP Total Daging Sapi Tingkat Nasional Data Tahun 2017 dan 2016 (persen)	22
Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Aceh.....	23
Gambar 11. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara.....	25
Gambar 12. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Barat.....	26
Gambar 13. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Riau	28
Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jambi	29
Gambar 15. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Selatan	31
Gambar 16. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Bengkulu	32
Gambar 17. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Lampung	34
Gambar 18. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35
Gambar 19. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kepulauan Riau	37
Gambar 20. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi DKI Jakarta ...	39
Gambar 21. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Barat....	41
Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Tengah.	43

Gambar 23. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi D.I. Yogyakarta	44
Gambar 24. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Timur ...	46
Gambar 25. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Banten.....	47
Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Bali.....	49
Gambar 27. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi NTB.....	50
Gambar 28. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi NTT	52
Gambar 29. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Barat.....	53
Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Tengah.....	55
Gambar 31. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Selatan	57
Gambar 32. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Timur	58
Gambar 33. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Utara.....	60
Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Utara.....	61
Gambar 35. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Tengah.....	63
Gambar 36. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Selatan	64
Gambar 37. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	66
Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Gorontalo.....	68
Gambar 39. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Barat.....	69
Gambar 40. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Maluku	71
Gambar 41. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Maluku Utara	72
Gambar 42. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Papua Barat ..	74
Gambar 43. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Papua.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Daging Sapi	3
Tabel 2. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Pola Utama Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Sapi di Indonesia Tahun 2016	20

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar VPDP17	83
---------------------------------	----

<https://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara produksi dan konsumsi sehingga suatu barang dapat tersalurkan dari produsen sampai ke konsumen. Distribusi perdagangan juga berkaitan erat dengan peran dari mediator-mediator yang terlibat di dalamnya. Rantai distribusi yang efisien idealnya akan berpengaruh pada tingkat biaya yang rendah dalam pendistribusian suatu komoditas.

Permasalahan rantai distribusi penting untuk diperhatikan khususnya pada komoditas kebutuhan pokok seperti daging sapi. Komoditas ini termasuk dalam daftar 20 bahan pokok penyumbang inflasi terbesar yang selalu dipantau secara intensif oleh pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2014 komoditas ini menyumbang andil sekitar 1,46 persen terhadap nilai inflasi yang terjadi pada kelompok bahan makanan. Satu tahun berikutnya, andil tersebut naik menjadi 5,10 persen terhadap nilai inflasi kelompok bahan makanan. Kenaikan tersebut disinyalir karena permintaan daging sapi yang tiap tahun kian meningkat.

Dilihat dari ketersediaannya, dalam lima tahun terakhir produksi daging sapi dalam negeri cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi, rata-rata pertumbuhan produksinya terbilang relatif stagnan. Dari data susenas yang dikumpulkan oleh BPS diungkapkan bahwa konsumsi rata-rata daging sapi masyarakat Indonesia pada 2017 diperkirakan sebesar 3,00 kg/kapita/tahun. Hasil proyeksi BPS menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada 2017 adalah 261,36 juta jiwa. Jika dikalikan, maka kebutuhan daging sapi nasional pada 2017 mencapai 784 ribu ton. Sementara itu, produksi daging sapi pada 2017 diperkirakan sebesar 532 ribu ton. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan daging sapi tersebut diperlukan tambahan suplai daging sapi dengan melakukan impor.

Tidak seimbangnya antara suplai dengan kebutuhan komoditas daging sapi diduga akan berpengaruh pada distribusi daging sapi yang tidak merata. Hal ini tercermin dari disparitas dan fluktuasi harga yang masih cukup tinggi antara daerah satu dengan daerah yang lain.

Untuk mengetahui gambaran lebih lanjut, pada 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (POLDIS) Perdagangan Beberapa Komoditas diantaranya adalah komoditas daging sapi. Hasil dari survei ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan komoditas-komoditas strategis yang lebih baik sebagai salah satu sumber informasi dalam menjawab permasalahan distribusi perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei POLDIS 2017 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan Survei

Tujuan Survei POLDIS 2017 yaitu:

- a. Menganalisis pola distribusi perdagangan.
- b. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan yang diterima pedagang mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir.

BAB II METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Survei Poldis Tahun 2018 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota cakupan Survei Biaya Hidup (SBH) dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 34 ibukota provinsi dan 207 kabupaten/kota potensi komoditas daging sapi dengan jumlah sampel sebanyak 1398 pelaku usaha. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan data kondisi tahun 2017.

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan dan non perdagangan. Perusahaan perdagangan terdiri dari perusahaan perdagangan besar dan kecil, seperti distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, eksportir, importir, dan pengecer. Untuk produsen daging sapi didekati melalui kegiatan rumah potong hewan (RPH), pengepakan daging bukan unggas, dan pedagang sapi potong hidup. Kegiatan usaha yang dicakup dalam survei ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Daging

Sapi

No	KBLI 2015	Uraian KBLI 2015
(1)	(2)	(5)
1	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
2	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup
3	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
4	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
5	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak
6	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditas Hasil Peternakan
7	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket

No	KBLI 2015	Uraian KBLI 2015
(1)	(2)	(5)
8	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)

2.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel pada survei ini terdiri dari dua *frame*, yaitu kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen hasil Listing Sensus Ekonomi 2016 (SE2016).

Kerangka sampel produsen daging sapi terbentuk dari usaha/perusahaan kategori C (industri pengolahan) yaitu Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas. Ditambah dengan usaha/perusahaan kategori G yaitu Perdagangan Besar Binatang Hidup dan Perdagangan Eceran Hewan Ternak/Hasil Peternakan.

Pembentukan kerangka sampel pedagang berasal dari hasil SE2016 kategori G (perdagangan besar dan eceran daging sapi/hasil peternakan). Baik kerangka sampel produsen maupun pedagang memuat usaha/perusahaan berskala besar, menengah dan kecil.

2.3 Metode Pemilihan Sampel

Usaha/perusahaan yang bersumber dari SE2016 diurutkan berdasarkan KBLI 2015 dan skala usaha (besar, menengah, kecil). Sampel usaha/perusahaan dipilih secara sistematis. Jika jumlah usaha/perusahaan dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh usaha/perusahaan akan dicacah. Pelaku usaha yang terpilih merupakan sampel yang saling independen. Jika alokasi usaha/perusahaan dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh usaha/perusahaan dalam *frame* akan dicacah.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari usaha/perusahaan terpilih dilakukan melalui wawancara antara pencacah dengan responden. Untuk perusahaan-perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu

kali kunjungan.

Jika sampel usaha/perusahaan terpilih tidak ditemukan pada saat pengumpulan data di lapangan, maka sampel tersebut akan diganti secara *purposive* tetapi tetap mempertahankan kriteria yang sesuai dengan sampel sebelumnya.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah tidak menelusuri responden dari hulu ke hilir (dari produsen ke pedagang eceran) di dalam jalur distribusi yang sama. Metode yang digunakan adalah dengan mendata sampel produsen sampai pedagang eceran pada satu waktu tertentu. Dengan demikian, responden yang didapat belum tentu memiliki relasi distribusi secara langsung satu sama lain.

2.5 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Adapun tahapan perhitungan MPP Total adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas yang menjadi fokus penelitian.

Contoh: pola utama distribusi perdagangan yang terbentuk adalah
Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

- b. Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi (MPP_i) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi nilai selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai pembeliannya.

Contoh: MPP Distributor = 9,71%; MPP Pedagang Eceran = 14,96%

- c. Menghitung MPP Total dengan formula sebagai berikut:

$$\left(\prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

MPP_i = selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku

usaha ke-i.

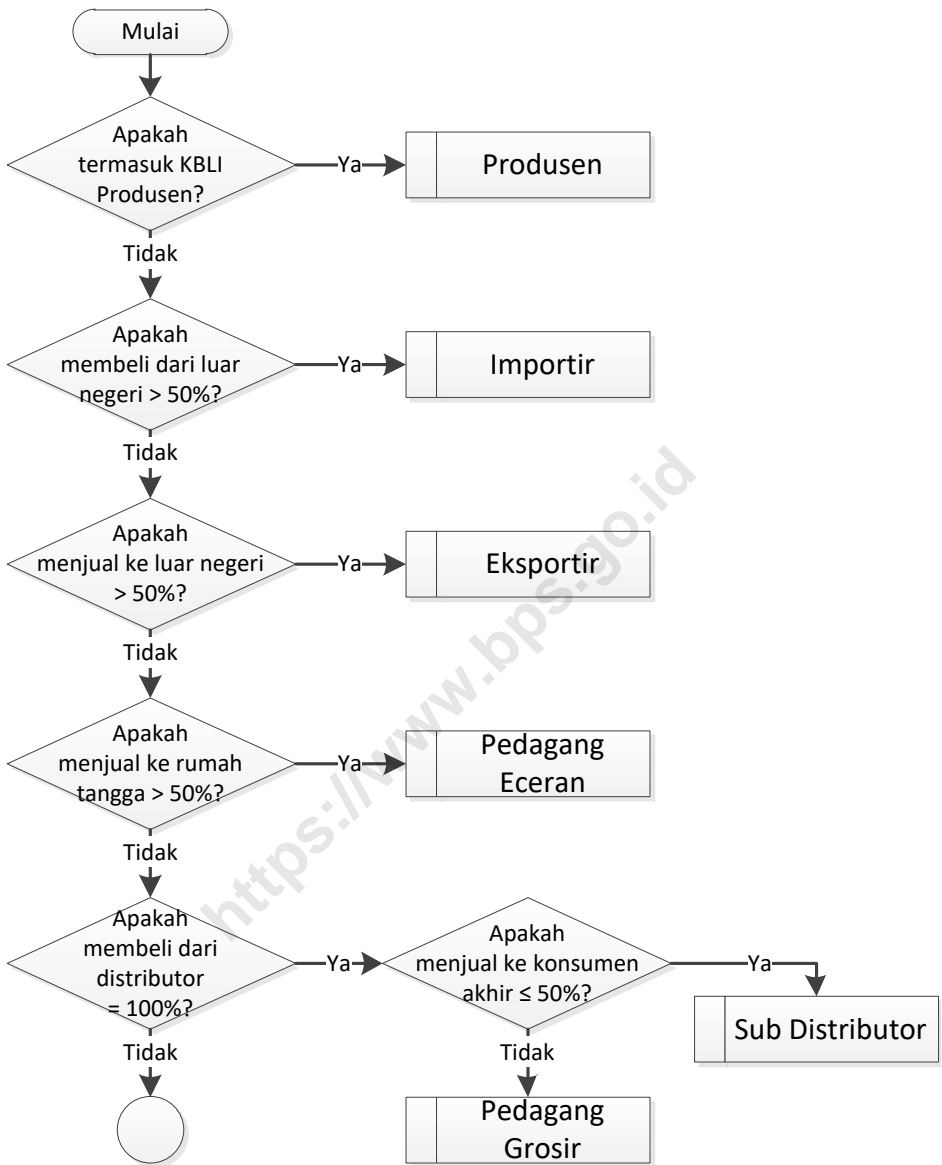
i = pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

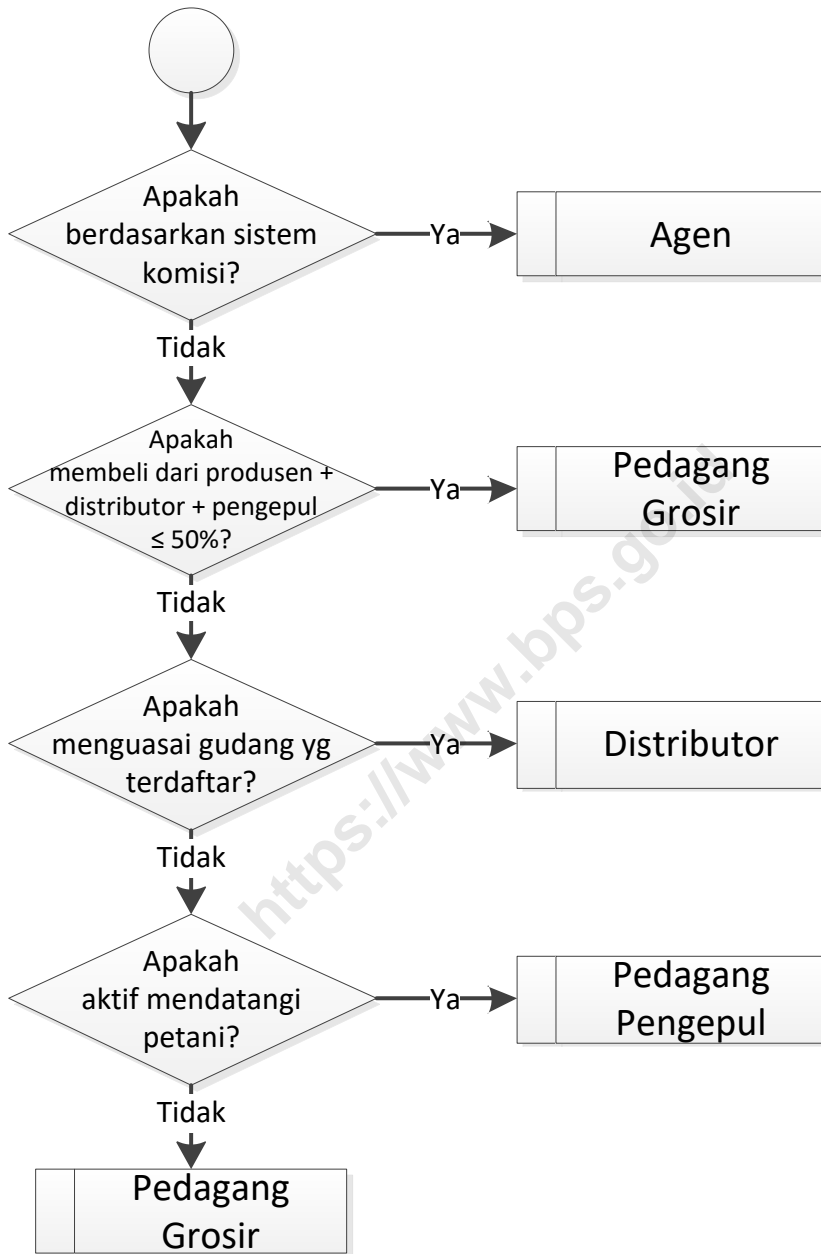
n = jumlah pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

Contoh: Total MPP = $\{[(1+9,71\%) \times (1+14,96\%)] - 1\} \times 100\% = 26,12\%$

2.6 Konsep dan Definisi

- a. **Usaha/perusahaan** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan).
- b. **Produsen** adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang (Permendag No. 22 Tahun 2016).
- c. **Perdagangan** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dasar barang, bertujuan untuk penyaluran barang serta mendapatkan nilai tambah (keuntungan).
- d. **Perdagangan besar** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan (Buku KBLI BPS 2015).
- e. **Perdagangan eceran** adalah adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. (Buku KBLI 2015).





Gambar 1. Flowchart Penentuan Pelaku Usaha




Menurut **Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang**, yang dimaksud distributor, sub distributor, agen, dan pedagang grosir adalah sebagai berikut:






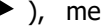
1. **Distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
2. **Sub Distributor** adalah adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
3. **Agen** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Pendapatan agen diperoleh dari komisi penjualan barang.
4. **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
5. **Eksportir** adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (**Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012**).
6. **Importir** adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengenal Importir/API. (**Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015**).

7. **Pedagang Eceran** adalah pedagang yang kegiatannya berkaitan dengan penjualan barang /jasa secara langsung pada konsumen akhir. Termasuk di dalamnya adalah **Supermarket/Swalayan**.
8. **Konsumen akhir** dalam survei ini antara lain **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan, dan juga Pemerintah dan Lembaga Nirlaba**. Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.
9. **Pola distribusi utama** adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila pola penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang hingga pada akhirnya ke konsumen akhir.
10. **Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)** adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.
11. Definisi **Daging sapi** yang diteliti dalam survei ini adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, layak konsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*). Tidak termasuk kepala, jeroan, tulang, kulit, gajih/lemak (Ditjennak Kementan).

2.7 Penjelasan Grafik Pola Distribusi

1. Pada setiap pembahasan akan ada ikon yang merepresentasikan pelaku usaha dan konsumen akhir sebagai berikut:

Ikon	Keterangan
	Produsen Daging Sapi
	Importir Daging Sapi
	Lambang Komoditas

2. Fungsi kelembagaan yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas dibedakan dalam warna. Pembagian warna tersebut adalah:
 - a. Warna biru langit () mewakili fungsi kelompok pedagang besar (PB).
 - b. Warna merah muda () mewakili fungsi kelompok pedagang eceran (PE).
 - c. Warna kuning muda () mewakili fungsi kelompok konsumen akhir.
3. Pembagian kelompok fungsi usaha yang dimaksud pada poin di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok PB : eksportir, importir, distributor, sub distributor, agen dan pedagang grosir.
 - b. Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran.
 - c. Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga.
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
 - a. Garis solid 1 poin (), menunjukkan alur distribusi penjualan yang di dapat dari data penjualan perdagangan menurut fungsi usaha/perusahaan.
 - b. Garis solid tebal 3 poin (), menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola distribusi utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang.
 - c. Garis putus-putus 1 poin (), menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari data pembelian perdagangan

menurut fungsi perusahaan/usaha yang menjadi pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus-putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.

- d. Garis putus titik titik putus (- · · →), menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari data penjualan maupun data sumber pembelian. Tipe garis ini digunakan bahwa jika informasi jalur terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka langsung digariskan ke PE. Sedang jika arus distribusi terjadi terputusnya di tingkat PE, maka langsung digariskan ke konsumen akhir. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus titik-titik putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.
5. Garis penghubung setiap fungsi usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap fungsi usaha. Rincian garis tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Eksportir/Importir diwakili warna ungu (—————→).
 - b. Distributor diwakili warna hijau (—————→)
 - c. Sub Distributor diwakili warna biru (—————→)
 - d. Agen diwakili warna merah (—————→)
 - e. Pedagang Grosir diwakili warna jingga (—————→)
 - f. Pedagang Eceran diwakili warna hitam (—————→)
 - g. Produsen diwakili warna coklat (—————→)

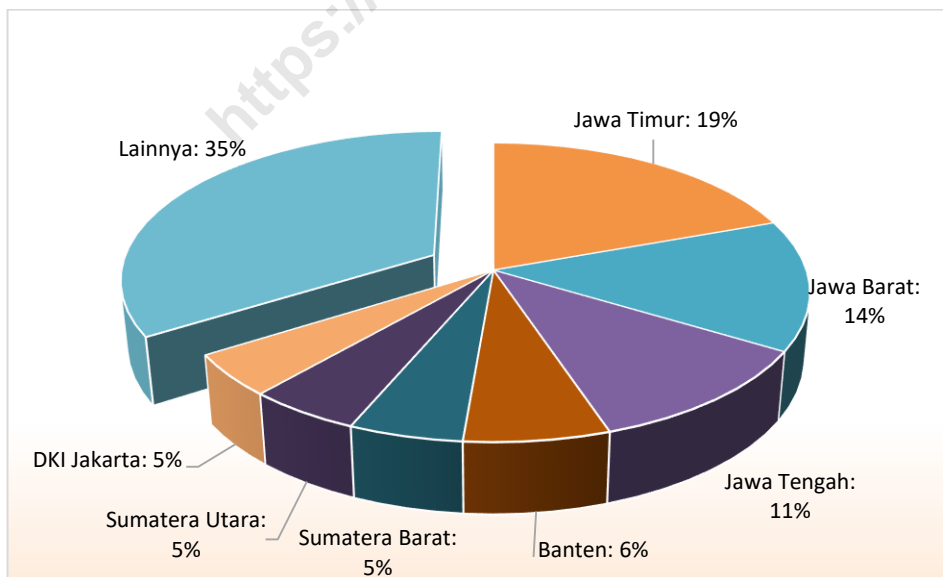
Setiap garis alur distribusi akan diberikan informasi kuantitatif berupa persentase garis distribusi dari satu fungsi usaha ke fungsi usaha lainnya. Khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus (- - →) maupun garis putus titik titik putus (- · · →) tidak disertakan informasi persentasenya. Garis tambahan yang telah berubah menjadi garis solid akan diberikan informasi berupa persentase dengan nilai 100%.

BAB III ULASAN RINGKAS

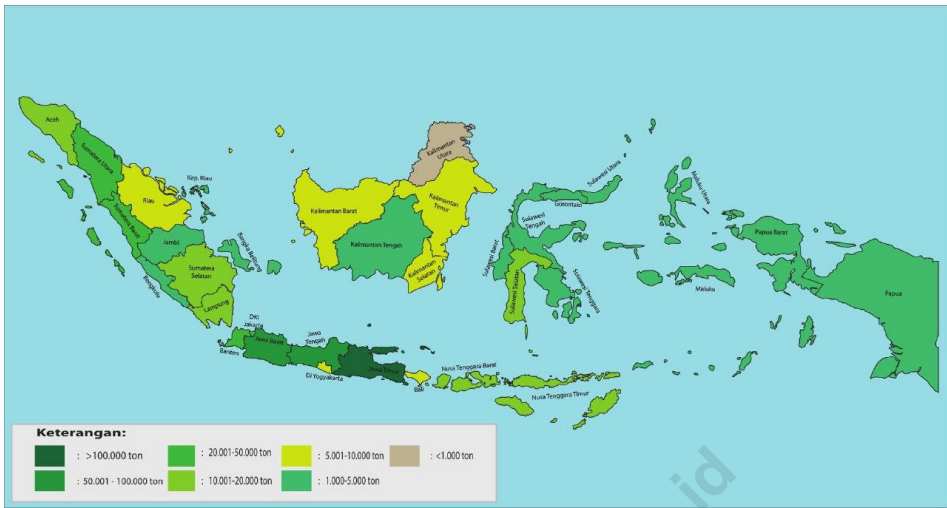
3.1 Gambaran Umum

Permintaan daging sapi sebagai sumber protein hewani cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini terjadi akibat jumlah penduduk yang terus meningkat dan naiknya konsumsi daging sapi per kapita. Pemenuhan protein hewani dari ayam dan telur sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri, tetapi daging sapi masih perlu impor.

Produksi daging sapi nasional tahun 2017 mencapai 532 ribu ton. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi penghasil daging sapi terbesar di Indonesia dengan share masing-masing sebesar 19 persen, 14 persen, dan 11 persen. DKI Jakarta sebagai wilayah metropolitan turut menyumbang produksi daging sapi sebesar 5 persen. Sementara itu Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan produksi daging sapi terendah dengan produksi sebesar 661 ton atau share kurang dari 1 persen.

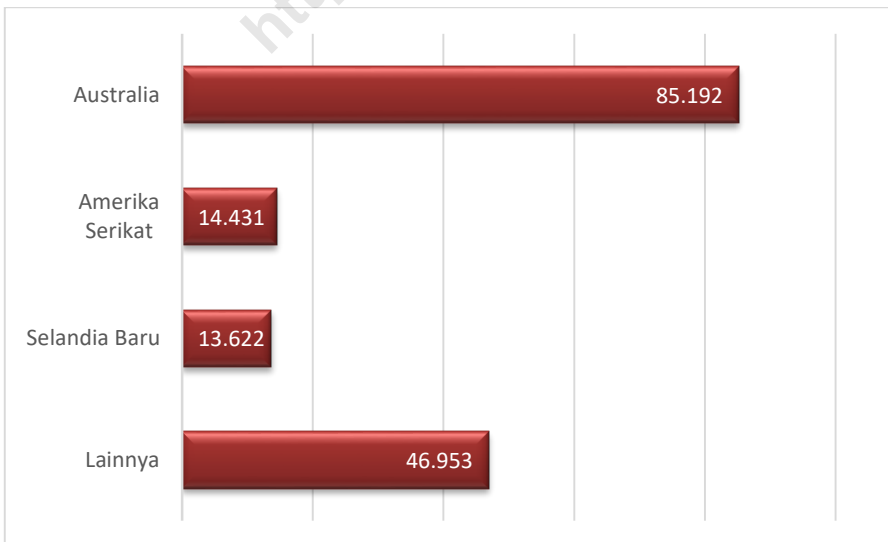


Gambar 2. Sentra Produksi Daging Sapi di Indonesia, 2017



Gambar 3. Peta Sebaran Produksi Daging Sapi di Indonesia, 2017

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Indonesia mengimpor daging sapi sekitar 160 ribu ton. Sebesar 53 persen daging sapi impor tersebut berasal dari Australia. Negara lain yang turut mengimpor daging sapi adalah Amerika Serikat dan Selandia Baru dengan share masing-masing sebesar 9 persen, serta Jepang, Malaysia, dan Singapura dengan share kurang dari 1 persen.



Gambar 4. Impor Daging Sapi Menurut Negara Asal (Ton), 2017

Mengutip dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, perkembangan harga daging sapi di tingkat konsumen sejak tahun 1983 hingga tahun 2017 cenderung terus meningkat rata-rata sebesar 12,75 persen per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 1992 yakni sebesar 61,05 persen menjadi Rp. 9.100 per kg dari tahun 1991 sebesar Rp. 5.650 per kg. Harga daging sapi lima tahun sebelumnya (2013 - 2017) juga terus meningkat, dari harga Rp.90.401 per kg hingga Rp. 115.779 per kg dengan pertumbuhan rata-rata 6,43 persen per tahun.

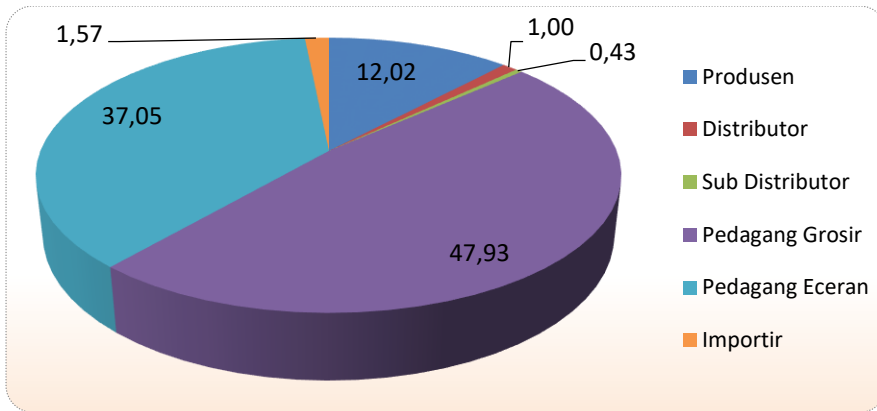
Harga daging sapi yang terus meningkat tersebut ditengarai sebagai akibat dari faktor pendistribusian komoditas dari produsen sampai dengan konsumen akhir yang masih bermasalah. Publikasi ini menggambarkan distribusi daging sapi dan margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen sampai ke konsumen akhir nasional dan di setiap provinsi melalui Survei Pola Distribusi Perdagangan komoditas daging sapi. Ulasan publikasi merupakan hasil survei terhadap 84 produsen, 356 pedagang besar, dan 259 pedagang eceran yang tersebar di 34 provinsi.

3.2 Indonesia

Cakupan wilayah survei secara nasional meliputi 34 ibukota provinsi dan 207 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih.

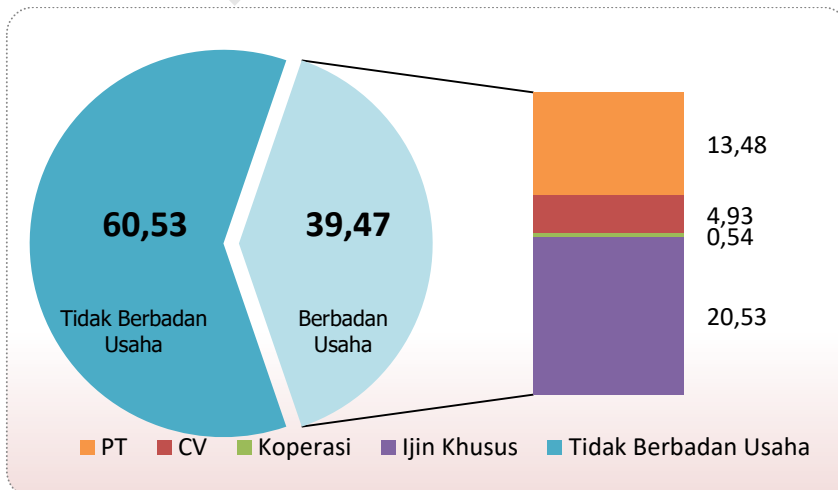
3.2.1 Profil Pelaku Usaha Komoditas Daging Sapi

Menurut Permendag Nomor 20 Tahun 2017, Pelaku Usaha Distribusi dapat didefinisikan sebagai perorangan/badan usaha yang menjalankan kegiatan penyaluran komoditas yang berkedudukan di dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hasil Survei Poldis 2017 memberikan gambaran bahwa mayoritas responden termasuk sebagai kelompok pedagang besar, baik sebagai distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir maupun importir. Sementara itu, 37,05 persen responden tercatat sebagai pedagang eceran, sedangkan 12,02 persen sisanya adalah produsen daging sapi.



Gambar 5. Pelaku Usaha Komoditas Daging Sapi Indonesia

Informasi lain yang dihasilkan adalah status badan usaha menurut jenis pelaku usaha. Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam berwirausaha karena berfungsi sebagai alat bukti yang sah kepemilikan suatu usaha. Selain itu, legalitas usaha juga dapat digunakan sebagai alat perlindungan hukum dan memudahkan pengusaha dalam hal akses permodalan untuk pengembangan usahanya. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa pelaku usaha yang belum berbadan usaha lebih dominan dibandingkan dengan yang sudah berbadan usaha. Masih sekitar 60 persen dari pelaku usaha distribusi komoditas daging sapi belum mengantongi izin usaha seperti PT, CV, Koperasi, dan Izin Khusus.

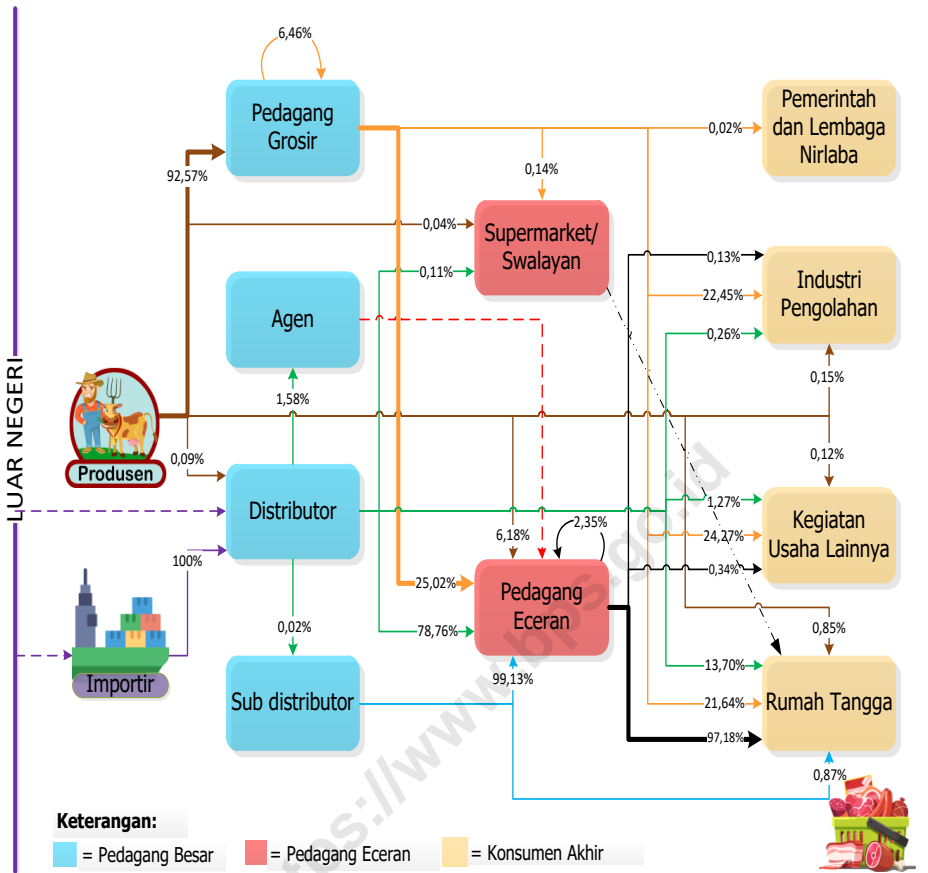


Gambar 6. Pelaku Usaha Komoditas Daging Sapi Indonesia menurut Status Badan Usaha (persen)

3.2.2 Pola Distribusi Perdagangan

Dalam skala nasional, hasil survei menunjukkan bahwa pola distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk melibatkan seluruh pelaku usaha mulai dari produsen, pedagang besar, hingga pedagang eceran. Pada level pedagang besar, terlibat juga importir yang turut berperan dalam memasok daging sapi dari luar negeri.

Dari pola distribusi perdagangan yang terbentuk, secara umum tampak bahwa distributor dan pedagang grosir memainkan peran cukup penting dalam pendistribusian daging sapi di lingkup nasional. Seperti yang tertera pada Gambar 6, distributor memiliki jaringan penjualan yang mampu menjangkau ke seluruh fungsi kelembagaan yang terlibat. Setelah menerima pasokan daging sapi dari importir, mayoritas pasokan daging oleh distributor dijual langsung ke pedagang eceran (78,76 persen). Selain itu, distributor juga menjual stok daging sapi ke pelaku usaha lain seperti sub distributor, agen, pedagang grosir, dan juga dipasarkan secara langsung ke konsumen akhir. Sementara itu, dari jalur produsen, pasokan daging sapi oleh produsen mayoritas dijual ke pedagang grosir. Kemudian pedagang grosir menjual daging sapi ke Pedagang Eceran, Industri Pengolahan, Kegiatan Usaha Lainnya, serta Rumah Tangga dengan persentase yang relatif hampir sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa saat ini pasokan daging sapi yang mengarah ke Industri Pengolahan dan Kegiatan Usaha Lainnya meningkat cukup besar. Artinya masyarakat Indonesia mulai beralih dari yang tadinya membeli daging sapi mentah menjadi membeli daging sapi yang sudah diolah, seperti sosis, nugget, rendang, dan lain sebagainya. Di akhir rantai distribusi, pedagang eceran yang menerima pasokan cukup besar dari distributor, pedagang grosir dan beberapa PB lain, memasarkan mayoritas stoknya ke rumah tangga (97,18 persen).



Gambar 7. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi Indonesia

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi secara nasional terbagi menjadi dua jalur sebagai berikut:

- Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir
- Importir → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang dimulai dari jalur produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Begitu pula rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang diawali dari jalur importir, yaitu tiga rantai. Akan tetapi pada jalur

importir, pedagang importir melewati pasokan daging sapi melalui distributor untuk kemudian ke pedagang eceran sebelum akhirnya ke konsumen akhir. Pola utama jalur produsen berpotensi menjadi lebih pendek ketika melalui pedagang grosir menjual pasokannya langsung ke konsumen akhir (persentase penjualan pedagang grosir ke industri pengolahan sebesar 22,45 persen, ke kegiatan usaha lainnya sebesar 24,27 persen, ke rumah tangga sebesar 21,64). Indikasi tersebut menggambarkan bahwa konsumsi masyarakat Indonesia akan daging sapi olahan semakin meningkat dibandingkan dengan konsumsi daging sapi segar (dimasak sendiri).

Potensi panjangnya rantai distribusi tersebut saat ini masih menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam upayanya mempertahankan stabilitas harga pangan. Selain menggelar operasi pasar secara rutin, terobosan baru pemerintah dalam memotong mata rantai pendistribusian daging sapi adalah menarik secara langsung pasokan daging dari *feedloter* (penggemukan sapi hidup) ke dalam koperasi-koperasi yang telah disiapkan. Koperasi-koperasi ini nantinya adalah hasil *upgrade* yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok peternak sapi. Ditambah lagi dengan keberadaan kapal ternak yang diyakini mampu menjadi stimulus produsen-produsen daging sapi di wilayah Indonesia Timur seperti Kepulauan Nusa Tenggara dalam mengembangkan populasi sapi potong. Langkah-langkah tersebut akan terus dimonitor dan harapannya dapat diaplikasikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dengan demikian, harga daging sapi diyakini akan tetap terjangkau oleh masyarakat.

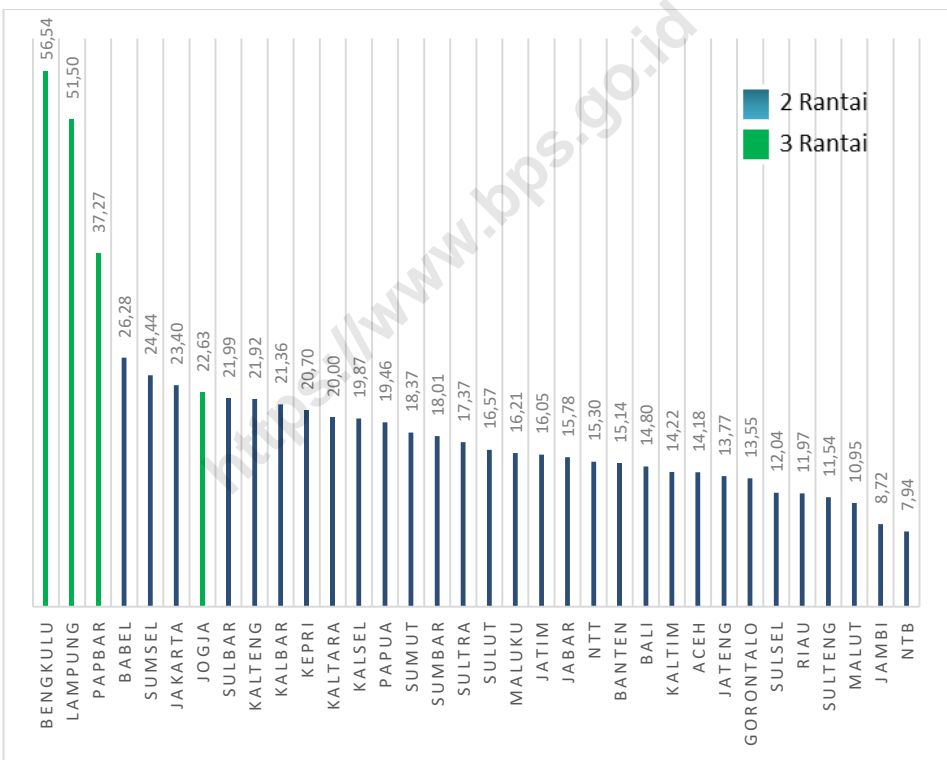
3.2.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Selain pola distribusi perdagangan, dari hasil survei diperoleh pula margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) total yang dihitung berdasarkan banyaknya rantai dan pelaku usaha yang terlibat pada pola utama distribusi perdagangan. Pola utama distribusi ini didapatkan dari persentase penjualan terbesar dari hulu (penjualan oleh produsen) ke hilir (penjualan oleh pedagang eceran). MPP secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Pola Utama Distribusi Komoditas Daging Sapi Data Tahun 2017

Kode Prov.	Provinsi	MPP Total	Rantai Utama	MPP Pelaku Utama	
				P.Grosir	Pengecer
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
11	Aceh	14,18	2		14,18
12	Sumatera Utara	18,37	2		18,37
13	Sumatera Barat	18,01	2		18,01
14	Riau	11,97	2	11,97	
15	Jambi	8,72	2	8,72	
16	Sumatera Selatan	24,44	2	24,44	
17	Bengkulu	56,54	3	17,29	33,46
18	Lampung	51,50	3	16,54	30,00
19	Kep. Bangka Belitung	26,28	2	26,28	
21	Kepulauan Riau	20,70	2		20,70
31	DKI Jakarta	23,40	2		23,40
32	Jawa Barat	15,78	2		15,78
33	Jawa Tengah	13,77	2	13,77	
34	D.I Yogyakarta	22,63	3	12,41	9,09
35	Jawa Timur	16,05	2		16,05
36	Banten	15,14	2		15,14
51	Bali	14,80	2		14,80
52	Nusa Tenggara Barat	7,94	2		7,94
53	Nusa Tenggara Timur	15,30	2	15,30	
61	Kalimantan Barat	21,36	2	21,36	
62	Kalimantan Tengah	21,92	2	21,92	
63	Kalimantan Selatan	19,87	2		19,87
64	Kalimantan Timur	14,22	2		14,22
65	Kalimantan Utara	20,00	2		20,00
71	Sulawesi Utara	16,57	2		16,57
72	Sulawesi Tengah	11,54	2	11,54	
73	Sulawesi Selatan	12,04	2		12,04
74	Sulawesi Tenggara	17,37	2		17,37
75	Gorontalo	13,55	2		13,55
76	Sulawesi Barat	21,99	2		21,99
81	Maluku	16,21	2		16,21
82	Maluku Utara	10,95	2	10,95	
91	Papua Barat	37,27	3	17,86	16,47
94	Papua	19,46	2		19,46
99	Indonesia	34,11	2	15,05	16,57

Dari tabel 2, didapatkan MPP total komoditas daging sapi untuk level nasional adalah 34,11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen (RPH) hingga ke konsumen akhir di Indonesia sebesar 34,11 persen. Lebih lanjut, ada 2 provinsi yang memiliki MPP diatas MPP nasional, yaitu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan MPP total daging sapi terbesar yaitu 56,54 persen. Sebaliknya Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan MPP total paling kecil yakni sebesar 7,94 persen. Grafik MPP secara lengkap tersaji sebagai berikut:

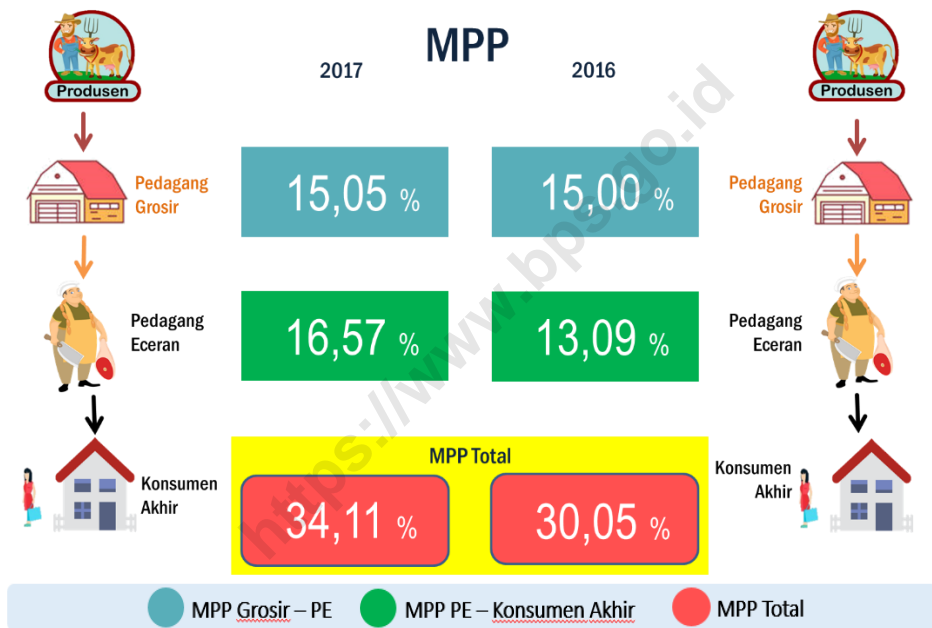


Gambar 8. Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total Daging Sapi Tingkat Provinsi (persen)

Pada Tahun 2017, komoditas daging sapi juga menjadi komoditas terpilih dalam Survei Pola Distribusi Komoditas Strategis (Poldis). Hasil Poldis 2017 untuk data Tahun 2016 menunjukkan bahwa pola utama distribusi daging sapi yang didapat sama dengan data Tahun 2017 (3 rantai), yaitu Produsen – Pedagang

Grosir – Pedagang Eceran – Konsumen Akhir. Dengan demikian, MPP total yang diperoleh merupakan MPP dari dua pedagang perantara tersebut. Masing-masing sebesar 15,00 persen untuk pedagang grosir, dan 13,09 persen untuk pedagang eceran, sehingga MPP totalnya sebesar 30,05 persen.

Secara umum, jika dibandingkan dengan MPP total tahun 2018, terlihat adanya sedikit peningkatan. Hal ini hendaknya dapat menjadi perhatian pemerintah dalam upaya stabilitas harga baik di level pedagang grosir maupun di level pengecer.



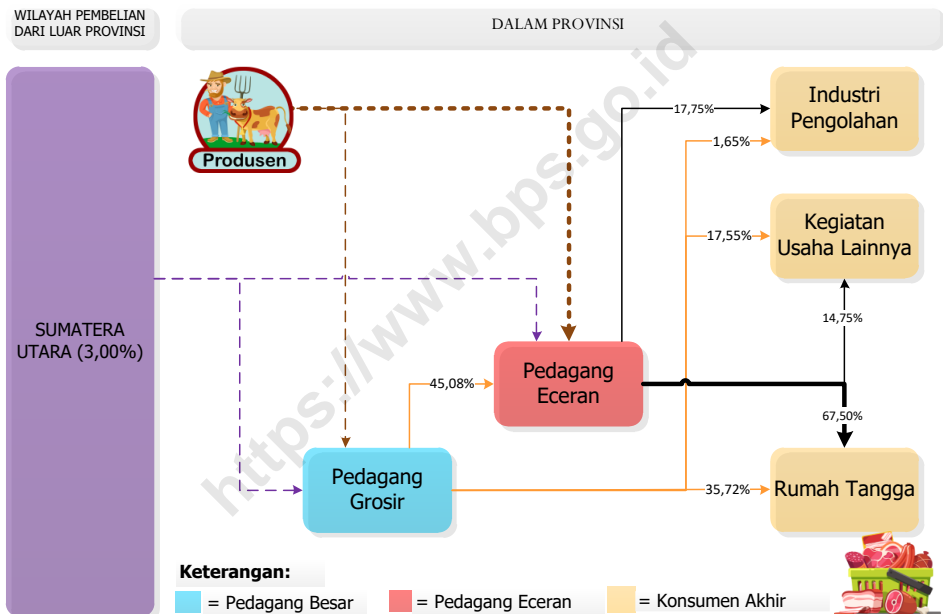
Gambar 9. Persentase MPP Total Daging Sapi Tingkat Nasional Data Tahun 2017 dan 2016 (persen)

3.3 Provinsi Aceh

Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang dialokasikan sebagai sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe.

3.3.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi daging sapi yang terbentuk terlihat cukup sederhana. Pelaku usaha distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Aceh terdiri dari produsen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pendistribusian terbesar dari pedagang grosir, yakni sekitar 45 persen, adalah ke pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan daging sapi beserta persentase penjualan dari setiap fungsi usaha perdagangan di Provinsi Aceh selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Aceh

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Aceh adalah:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk di Aceh dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.3.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

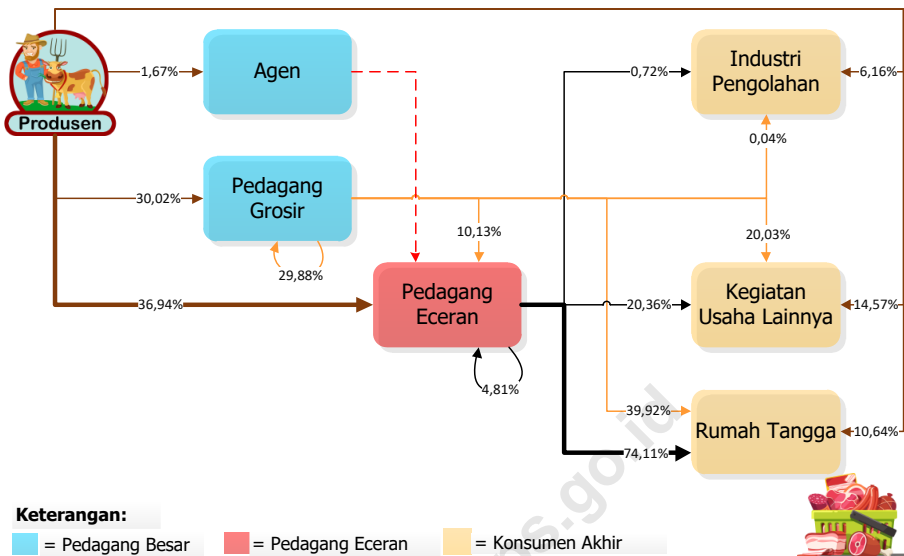
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Aceh adalah sebesar 14,18 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Aceh adalah sebesar 14,18 persen.

3.4 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Binjai.

3.4.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari produsen, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pendistribusian terbesar dari produsen, yaitu sekitar 37 persen adalah ke pedagang eceran. Sementara itu pedagang grosir mendistribusikan komoditasnya ke konsumen akhir rumah tangga dan kegiatan usaha lain seperti restoran, rumah sakit, hotel, dll. Pedagang eceran kemudian mendistribusikannya ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Sumatera Utara selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk di Sumatera Utara dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.4.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 18,37 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 18,37 persen.

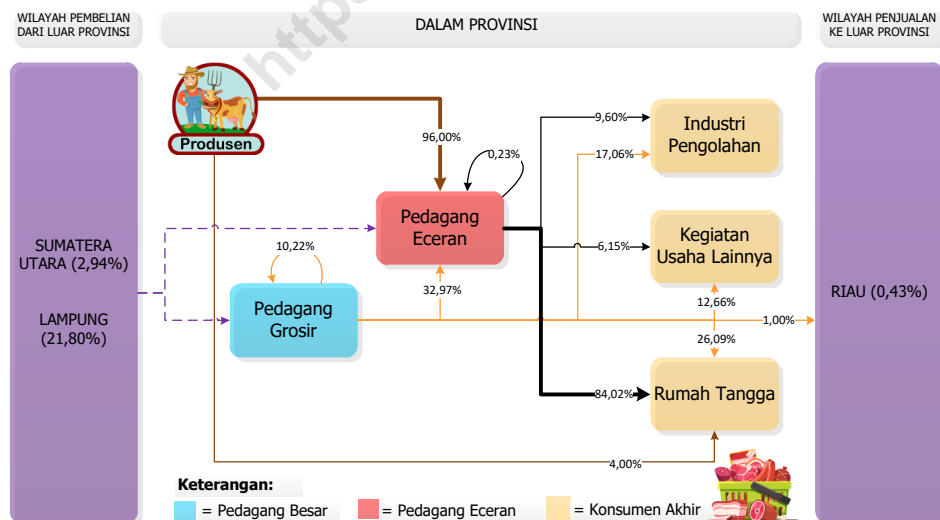
3.5 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.

3.5.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari produsen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Produsen mendistribusikan daging sapi ke pedagang eceran dan langsung ke rumah tangga dengan pendistribusian terbesar, yakni sekitar 96 persen, adalah ke pedagang eceran. Adapun pendistribusian terbesar dari pedagang besar grosir adalah ke pedagang eceran. Untuk memenuhi permintaan, pedagang grosir memasok daging sapi dari luar provinsi, yaitu provinsi Lampung dan Sumatera Utara.

Pola distribusi perdagangan daging sapi beserta persentase penjualan dari setiap fungsi usaha perdagangan di Provinsi Sumatera Barat selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 12. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Barat

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sumatera Barat adalah:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk di Sumatera Barat dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.5.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

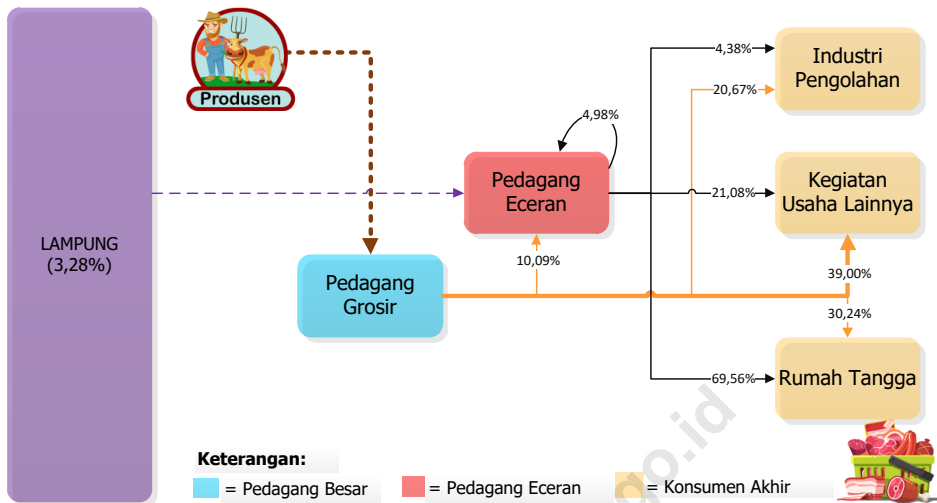
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 18,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 18,01 persen.

3.6 Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Pekanbaru.

3.6.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi daging sapi yang terbentuk terlihat cukup sederhana. Pola perdagangan daging sapi di Provinsi Riau melibatkan beberapa fungsi usaha seperti produsen, pedagang grosir, dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 13. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Riau

Jalur perdagangan berawal dari produsen yang memasarkan stok daging sapihnya ke pedagang grosir. Pedagang grosir kemudian menjual mayoritas pasokan daging sapihnya langsung ke konsumen akhir yaitu rumah tangga, kegiatan usaha lain, dan industri pengolahan, dan sebagian lainnya dijual ke pedagang eceran. Pedagang eceran yang telah mendapatkan stok dari pedagang grosir kemudian menjual hampir 70 persen pasokan daging sapihnya ke rumah tangga, sedangkan sisanya dipasarkan ke kegiatan usaha lain.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang grosir. Sementara konsumen akhirnya adalah kegiatan usaha lainnya.

3.6.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

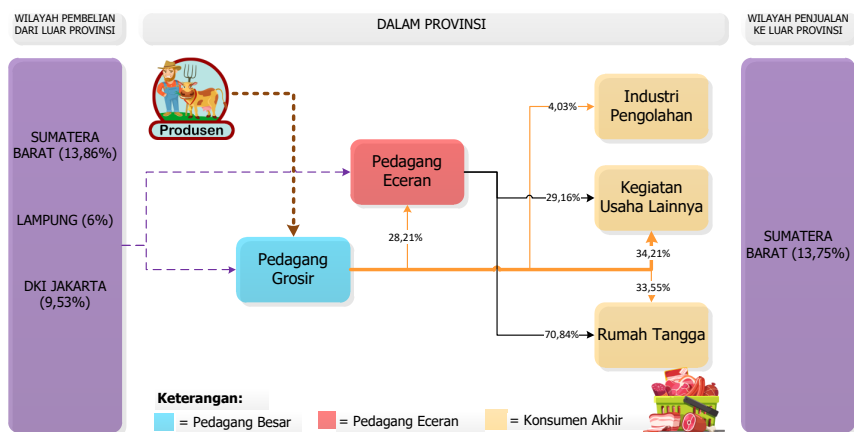
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Riau adalah sebesar 11,97 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Riau adalah sebesar 11,97 persen.

3.7 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

3.7.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi daging sapi yang terbentuk terlihat cukup sederhana. Para pelaku usaha distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Jambi hanya melibatkan produsen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Jalur distribusi dimulai berawal dari produsen yang menjual stok daging sapi ke pedagang grosir. Pedagang grosir kemudian menjual sebagian besar supplinya ke rumah tangga, kegiatan usaha lainnya, dan juga ke pedagang eceran. Sementara 4 persen sisanya didistribusikan ke industri pengolahan. Sekitar 70 persen stok daging sapi di pedagang eceran didistribusikan ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Jambi secara lengkap disajikan pada Gambar 13.



Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jambi

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang grosir. Akan tetapi, pola utama tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika pedagang grosir memasarkan stok daging sapi ke pedagang eceran terlebih dahulu sebelum ke konsumen akhir (rumah tangga).

3.7.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Jambi adalah sebesar 8,72 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jambi adalah sebesar 8,72 persen.

3.8 Provinsi Sumatera Selatan

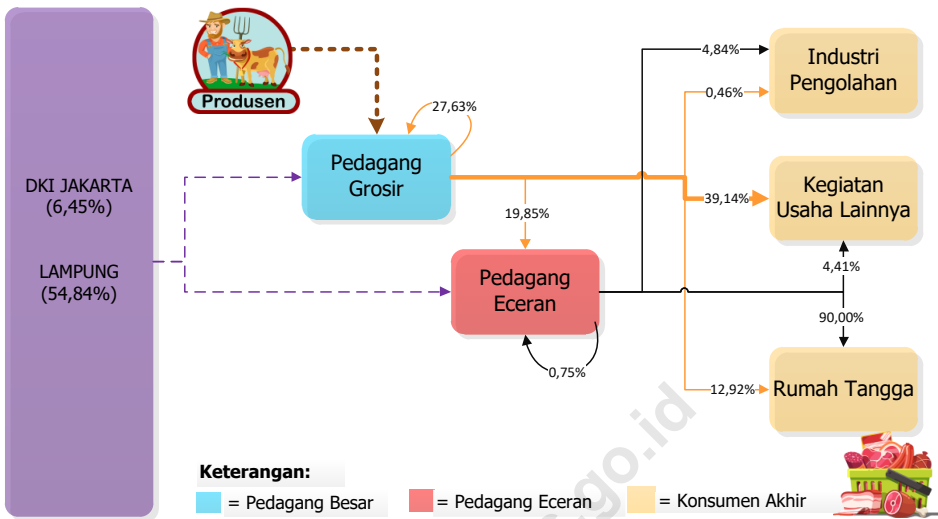
Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Kota Lubuklinggau.

3.8.1 Pola Distribusi

Pola perdagangan daging sapi di Provinsi Sumatera Selatan tidak banyak melibatkan fungsi usaha kelembagaan. Produsen menyuplai sebagian pasokannya ke pedagang grosir. Kemudian, pedagang grosir meneruskan rantai distribusi tersebut langsung ke konsumen akhir, dengan persentase penjualan terbesar (39,14%) menuju kegiatan usaha lainnya. Selain itu, pedagang eceran yang mendapat pasokan daging sapi dari pedagang grosir, memasarkan stok daging sapi mayoritas langsung ke rumah tangga. Secara lengkap pola distribusi Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Gambar 15. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Selatan

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagog Grosir → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang grosir.

3.8.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

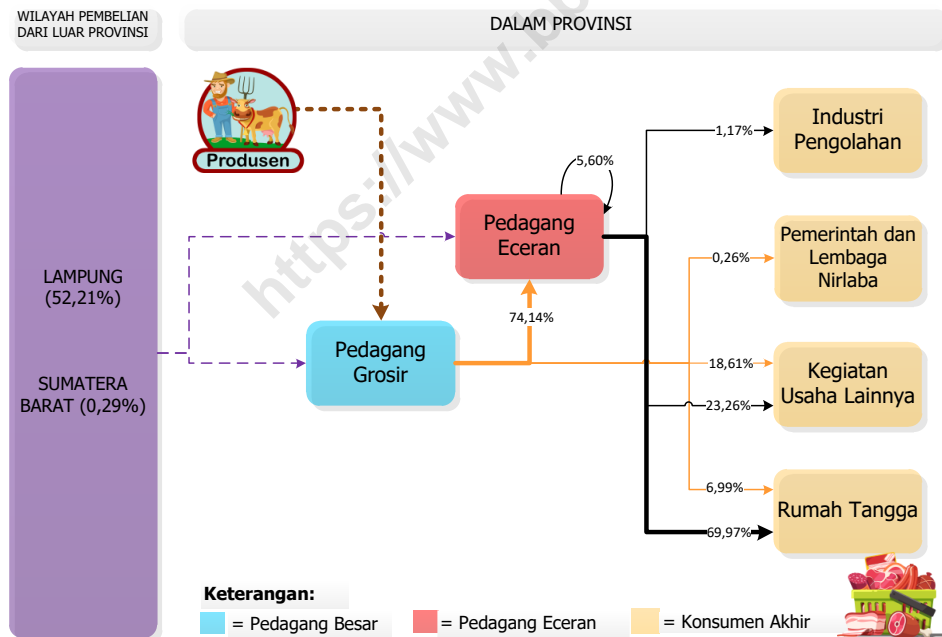
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 24,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 24,44 persen.

3.9 Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, dan Kota Bengkulu.

3.9.1 Pola Distribusi

Jalur distribusi berawal dari pedagang grosir yang mendapatkan stok dari produsen. Pedagang grosir mendistribusikan stok daging sapi tersebut sebagian besar melalui pedagang eceran (74,14%). Kemudian, pedagang eceran mendistribusikan stok daging sapi langsung ke rumah tangga, juga ke kegiatan usaha lain dan industri pengolahan. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Bengkulu secara lengkap disajikan pada Gambar 15.



Gambar 16. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Bengkulu

Adapun rantai distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Jumlah rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga. Tidak ada potensi bahwa rantai distribusi tersebut akan menjadi lebih panjang dari pola utamanya.

3.9.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

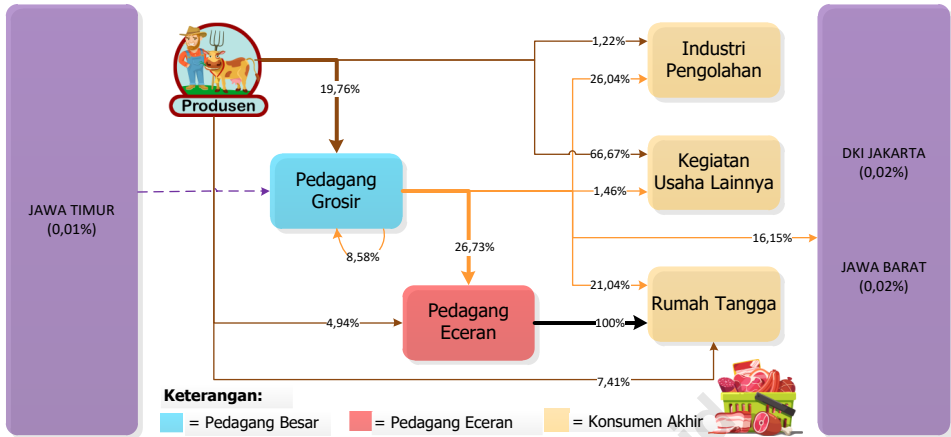
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 56,54 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 56,54 persen. Angka ini merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

3.10 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

3.10.1 Pola Distribusi

Produsen memainkan fungsi yang cukup penting karena memiliki jaringan perdagangan yang cukup luas. Disamping itu, produsen juga turut menentukan jalur distribusi utama perdagangan dimana ia menyuplai 19,76 persen ke pedagang grosir. Kemudian, pedagang grosir menyuplai pasokan daging sapi ke pedagang eceran, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, serta rumah tangga, dengan persentase terbesar ke pedagang eceran (26,73%). Pedagang eceran yang telah menerima pasokan dari pedagang grosir tersebut meneruskan ujung rantai distribusi 100 persen ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Lampung secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 17. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Lampung

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagog Grosir → Pedagog Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.10.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Lampung adalah sebesar 51,50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Lampung adalah sebesar 51,50 persen.

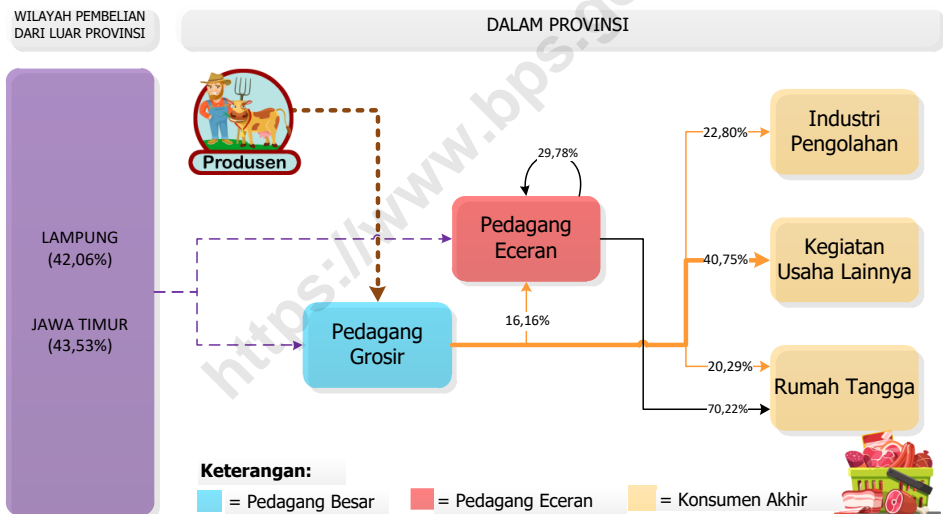
3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi

Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang.

3.11.1 Pola Distribusi

Secara umum pedagang grosir merupakan pelaku usaha yang paling menentukan arah dari jalur distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk. Pedagang grosir yang mendapatkan pasokan dari produsen, melanjutkan jalur pemasaran ke kegiatan usaha lainnya dengan menjual 40,75 persen pasokannya. Pedagang eceran menjual pasokan daging sapi ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Bangka Belitung secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 18. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai.

Pendistribusian utamanya melibatkan hanya satu pedagang perantara, yaitu pedagang grosir. Sementara konsumen akhirnya adalah Kegiatan Usaha Lainnya.

3.11.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

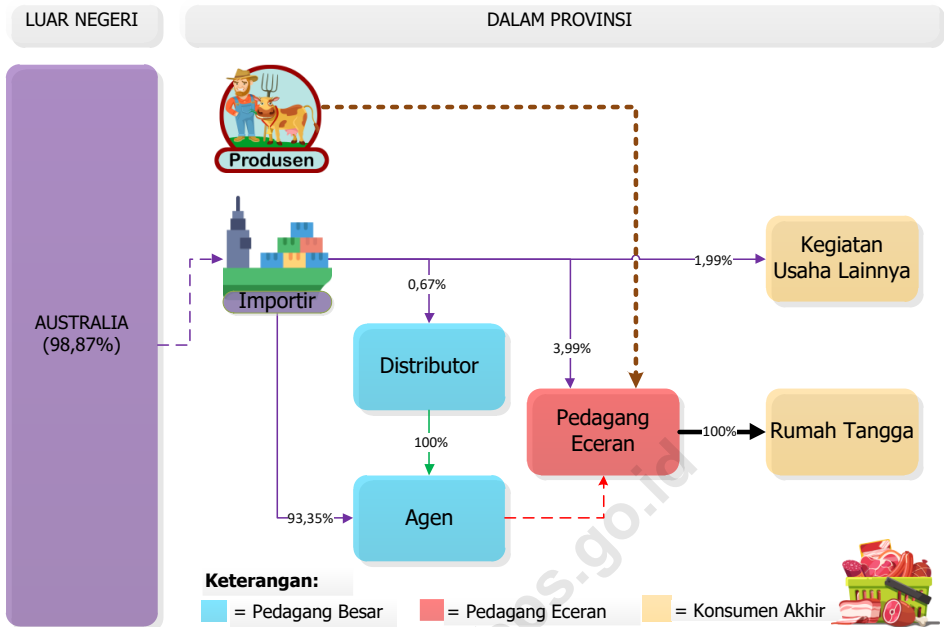
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 26,28 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 26,28 persen.

3.12 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

3.12.1 Pola Distribusi

Dari hasil pencacahan terhadap beberapa pedagang daging sapi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, didapatkan informasi bahwa pergerakan arus distribusi daging sapi di Kepulauan Riau sangat tergantung pada pihak-pihak produsen maupun importir. Oleh karena keadaan geografis yang merupakan wilayah kepulauan serta merupakan pintu gerbang dari negara tetangga, ada indikasi kuat bahwa para pedagang eceran melakukan pengadaan stok daging sapi dari luar negeri melalui importir, agen, dan distributor. Selain itu, produsen juga menjual stok daging sapi ke pedagang eceran. Disamping itu, importir juga menjual sebagian stoknya ke kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 19. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kepulauan Riau

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk adalah dua rantai. Dari produsen hanya melibatkan pedagang eceran sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.12.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

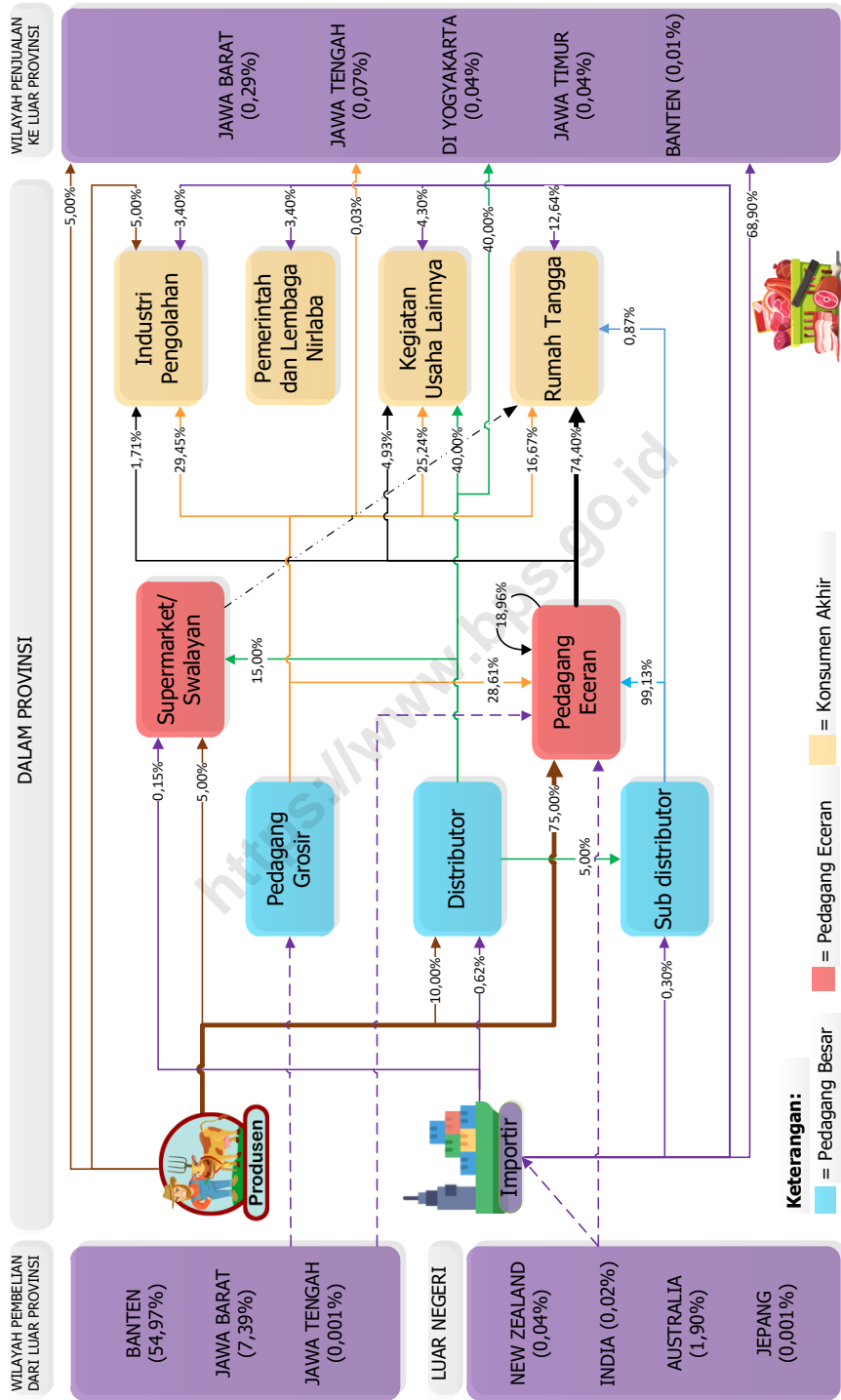
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 20,70 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 20,70 persen.

3.13 Provinsi DKI Jakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi seluruh kota administrasi di DKI Jakarta, yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara.

3.13.1 Pola Distribusi

Dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, kebutuhan masyarakat DKI Jakarta akan komoditas bahan pokok seperti daging sapi pun sangat besar. Hal ini tercermin dari kompleksnya rantai distribusi perdagangan komoditas tersebut di kota Megapolitan ini. Hasil survei menunjukkan secara umum banyak fungsi kelembagaan pada level pedagang besar yang berperan dalam jalur distribusi daging sapi seperti distributor, sub distributor, pedagang grosir, hingga melibatkan importir. Tampak pada Gambar 19 daging sapi yang ada di ibukota ini didominasi oleh daging sapi impor dari luar negeri. Jalur importir menguasai pangsa pasar secara global dari pedagang besar, pedagang eceran, hingga sampai ke konsumen akhir. Selain itu, ada sebagian kecil pasokan daging yang berasal dari produsen yang hanya membantu pasokan daging melalui pedagang eceran di tingkat rumah tangga.



Gambar 19. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi DKI Jakarta

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran dengan konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.13.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 23,40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 23,40 persen.

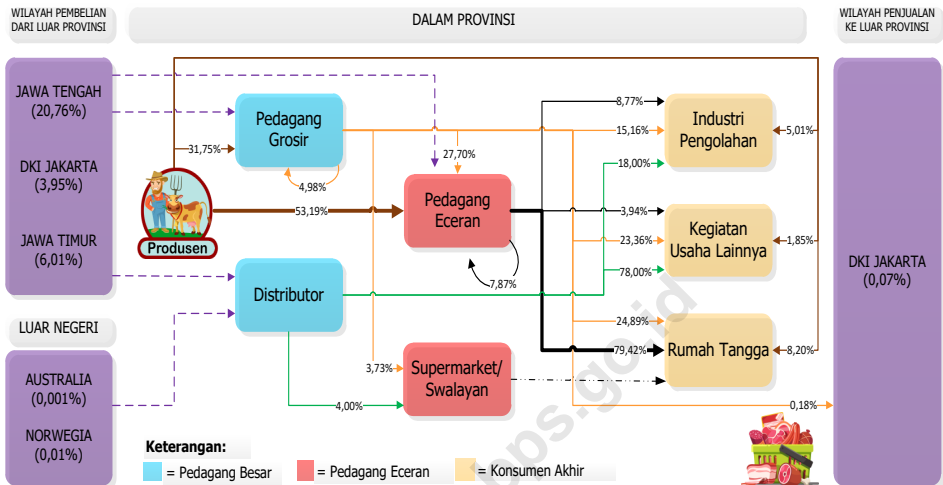
3.14 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya.

3.14.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Jawa Barat melibatkan cukup banyak fungsi usaha seperti distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan juga supermarket/swalayan. Produsen menjual stok daging sapi ke pedagang grosir, pedagang eceran, maupun langsung ke konsumen akhir, yang mayoritas penjualannya ke pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang eceran sebagai penerima pasokan terbesar dari produsen mendistribusikan stok daging sapi yang di dapat ke konsumen akhir dan sesama pedagang eceran yang mayoritas ke rumah

tangga (79,42%). Sedangkan daging impor dari luar negeri didistribusikan oleh distributor ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Pola perdagangan daging sapi di Provinsi Jawa Barat tersaji pada gambar berikut.



Gambar 21. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Barat

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari baik dari produsen sampai dengan konsumen akhir (rumah tangga) adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang eceran. Namun, pola utama tersebut berpotensi menjadi lebih panjang jika melalui jalur: produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.14.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 15,78 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 15,78 persen.

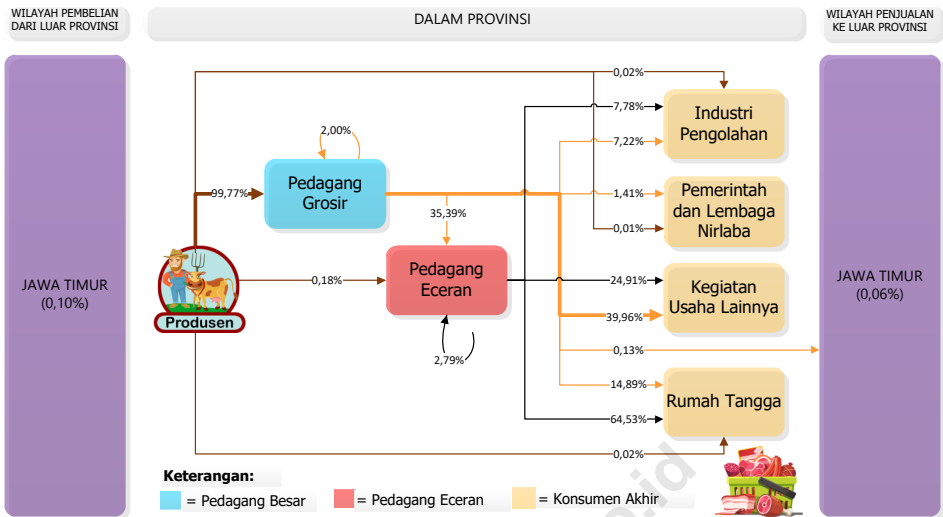
3.15 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal.

3.15.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Jawa Tengah tidak melibatkan cukup banyak fungsi usaha, hanya terdapat pedagang grosir dan pedagang eceran. Produsen menjual daging sapi hampir semua ke pedagang grosir. Pedagang grosir memiliki jaringan distribusi cukup luas, dari menjual ke pedagang eceran hingga menjangkau secara langsung ke konsumen akhir, dengan persentase terbesar ke kegiatan usaha lainnya sebesar 39,96 persen.

Pedagang eceran yang telah menerima pasokan dari pedagang grosir tersebut meneruskan ujung rantai distribusi ke konsumen akhir, dengan persentase penjualan terbesar diterima oleh rumah tangga (64,53%). Pola perdagangan daging sapi di Provinsi Jawa Tengah tersaji pada Gambar 21.



Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Tengah

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai, dengan melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang grosir. Sementara konsumen akhirnya adalah kegiatan usaha lainnya.

3.15.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 13,77 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 13,77 persen.

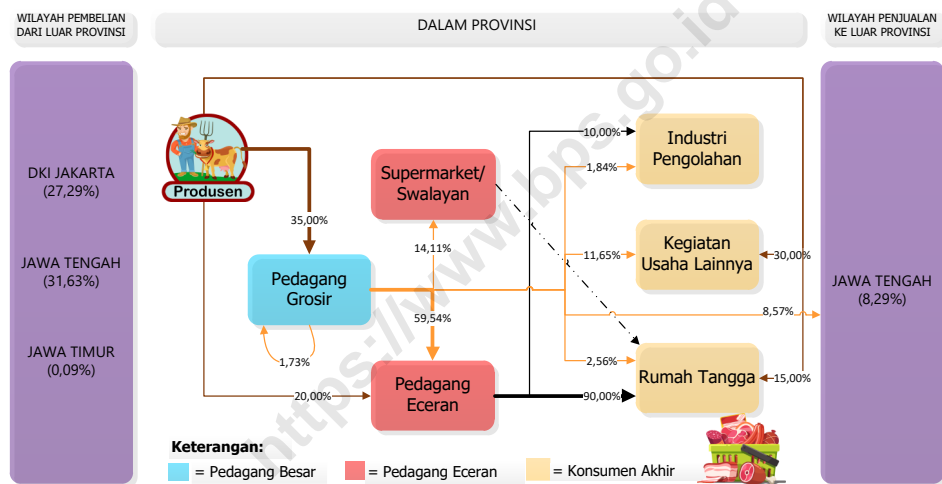
3.16 Provinsi D.I. Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi D.I. Yogyakarta yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten

Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

3.16.1 Pola Distribusi

Produsen secara bersamaan memasok stok daging sapi ke dua fungsi usaha, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Kedua fungsi usaha tersebut langsung menjual pasokannya ke konsumen akhir, walaupun pedagang grosir menjual juga sebagian stok daging sapi nya melewati supermarket, pedagang eceran dan pedagang grosir lain. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 23. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi D.I. Yogyakarta

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, dengan melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.16.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi DI Yogyakarta adalah sebesar 22,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DI Yogyakarta adalah sebesar 22,63 persen.

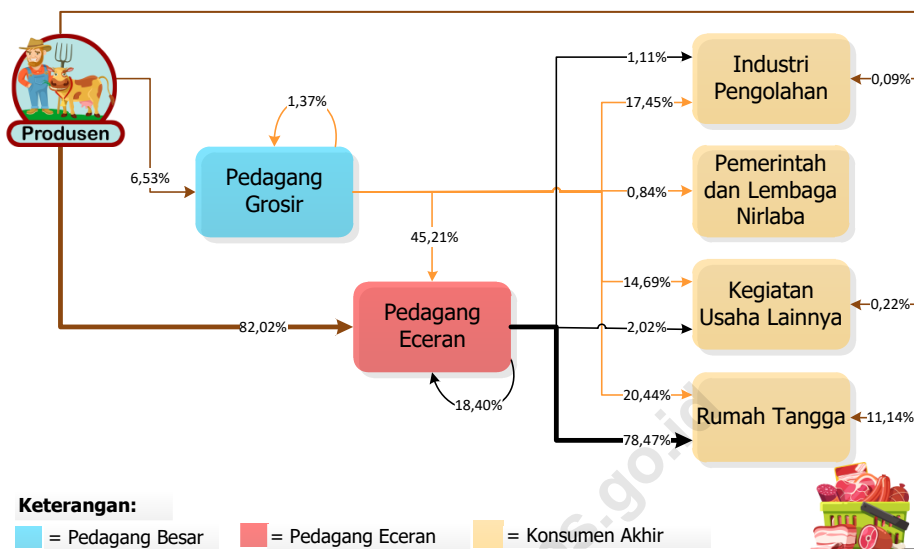
3.17 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya.

3.17.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, pola distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk memiliki tingkat kompleksitas yang hampir sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Distribusi daging sapi di Provinsi Jawa Timur hanya melibatkan fungsi usaha perdagang grosir dan pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Jawa Timur secara lengkap disajikan pada gambar berikut:

DALAM PROVINSI



Gambar 24. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Timur

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai, dengan melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga. Akan tetapi, panjang pola utama tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.17.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 16,05 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 16,05 persen.

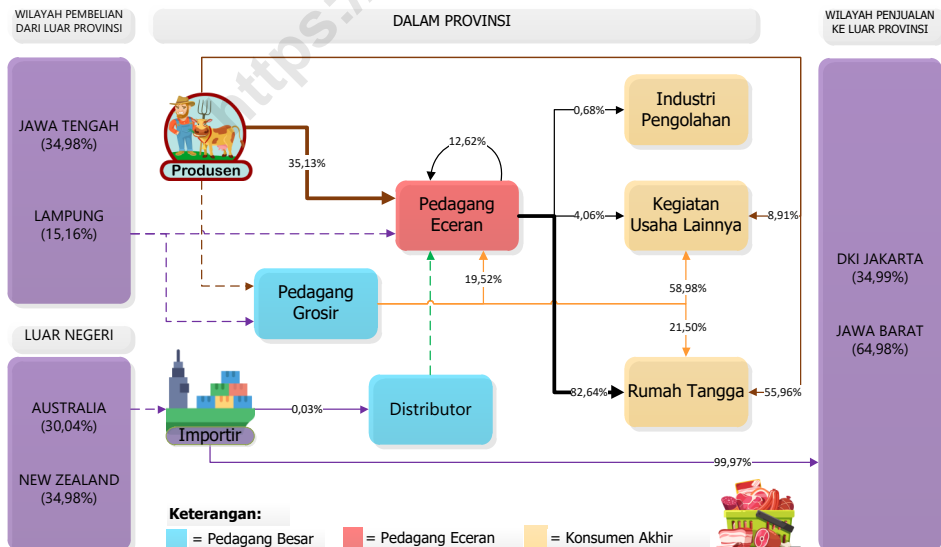
3.18 Provinsi Banten

Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang.

3.18.1 Pola Distribusi

Jalur distribusi daging sapi di Provinsi Banten terpecah menjadi tiga jalur, yaitu dari produsen, dari provinsi lain, serta impor dari Negara lain. Untuk jalur produsen, produsen mendistribusikan daging sapi ke pedagang eceran, sebelum menjualnya ke konsumen akhir. Kemudian jalur luar provinsi, daging sapi di distribusikan oleh pedagang grosir. Sedangkan dari importir, daging sapi dijual melalui distributor sebelum dijual ke pedagang eceran.

Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan daging sapi di provinsi Banten cukup banyak, seperti importir, distributor, pedagang grosir, serta pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada Gambar 24.



Gambar 25. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Banten

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai, dengan melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.18.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

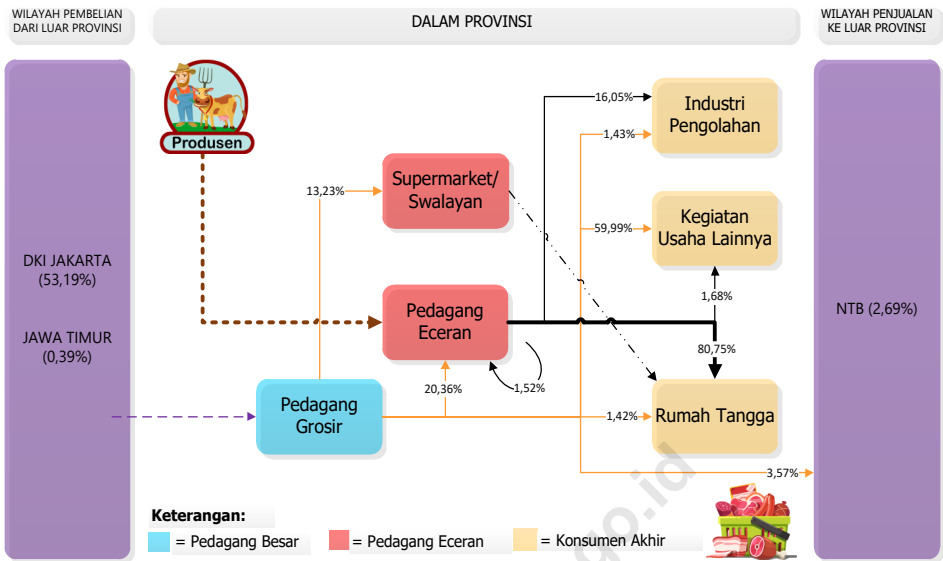
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Banten adalah sebesar 15,14 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Banten adalah sebesar 15,14 persen.

3.19 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

3.19.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Bali melibatkan tidak banyak fungsi kelembagaan, hanya pedagang grosir, pedagang eceran, serta supermarket. Secara umum, kedudukan pedagang grosir daging sapi di pulau dewata ini cukup vital karena mampu menyuplai pasokan daging sapi ke berbagai fungsi kelembagaan lain. Dari Gambar 25 tampak bahwa jaringan penjualan dari pedagang grosir mampu menjangkau hingga konsumen akhir secara langsung.



Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Bali

Sementara itu, pola utama distribusi komoditas daging sapi di provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.19.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

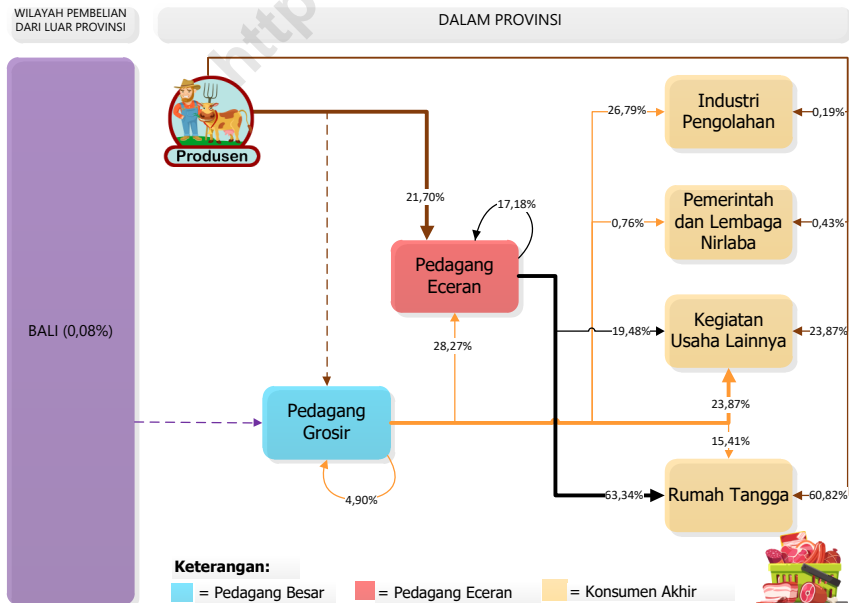
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Bali adalah sebesar 14,80 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bali adalah sebesar 14,80 persen.

3.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima.

3.20.1 Pola Distribusi

Dikenal sebagai salah satu daerah pengembangan populasi sapi potong di Indonesia, hasil survei menunjukkan bahwa rantai distribusi daging sapi di Provinsi NTB terlihat cukup sederhana. Produsen sebagai pelaku usaha di hulu menjual 20 persen dari hasil produksi daging sapi ke pedagang eceran. Selain itu, produsen justru memasarkan sebagian besar pasokannya ke konsumen akhir dengan 60 persen lebih ke rumah tangga secara langsung. Dari data pembelian, diperoleh informasi pula bahwa pedagang grosir juga mendapatkan suplai daging sapi dari produsen dan provinsi lain. Kemudian, oleh pedagang grosir suplai tersebut diperdagangkan ke pedagang eceran serta sebagian yang lain diteruskan ke konsumen akhir (rumah tangga, industri pengolahan, kegiatan usaha lain). Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi NTB secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 27. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi NTB

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi NTB dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang eceran saja. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.20.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 7,94 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 7,94 persen. Angka ini merupakan yang terendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

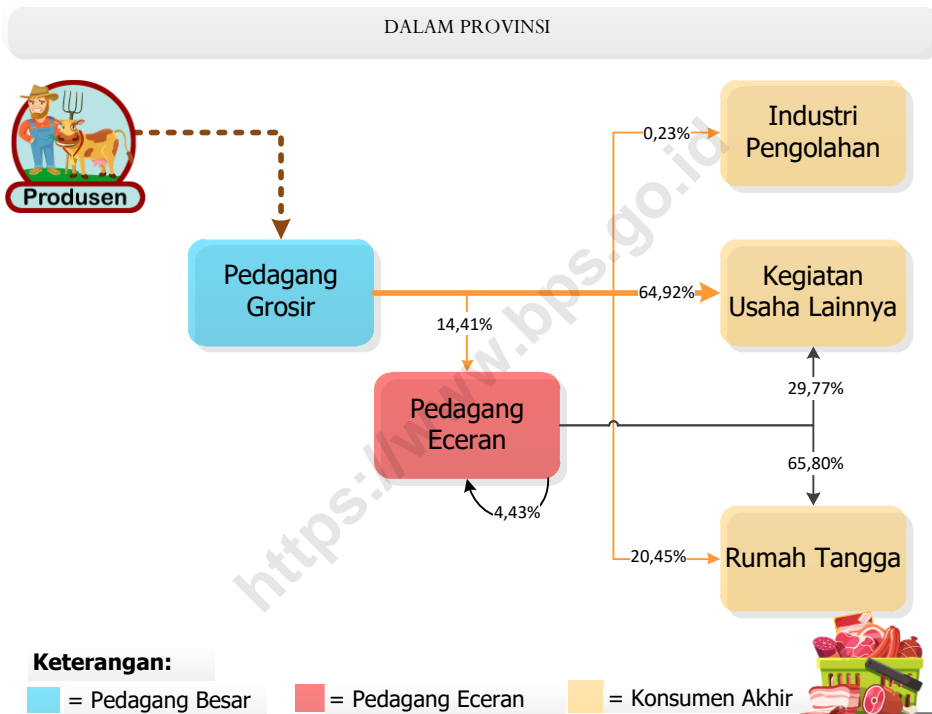
3.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang.

3.21.1 Pola Distribusi

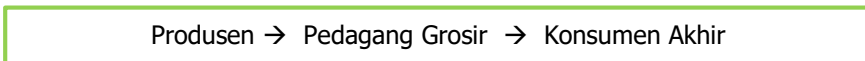
Pola distribusi daging sapi di Provinsi NTT melibatkan dua lembaga usaha perdagangan yaitu, pedagang grosir dan pedagang eceran. Data survei menggambarkan bahwa pendistribusian daging sapi dari hulu ke hilir lebih didominasi oleh kontribusi dari pedagang grosir secara langsung. Berdasarkan Gambar 28, dapat dilihat bahwa pedagang eceran mendapat pasokannya dari pedagang grosir, kemudian menjualnya mayoritas ke rumah tangga. Sementara itu, dari data pembelian, didapatkan informasi bahwa pedagang grosir yang menerima pasokan dari produsen, menjual sebagian besar daging sapi ke kegiatan usaha

lainnya. Sebagian kecil sisanya di jual ke pedagang eceran untuk kemudian diteruskan ke rumah tangga. Akan tetapi, jika dilihat lebih seksama, sebagian besar suplai dari hulu baik oleh produsen, distributor, dan pedagang grosir mengarah untuk memenuhi tingginya permintaan daging dari Kegiatan Usaha Lain seperti restoran/rumah makan, perhotelan, dan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi NTT secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 28. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi NTT

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai.

Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang grosir saja. Sementara konsumen akhirnya adalah kegiatan usaha lainnya.

3.21.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

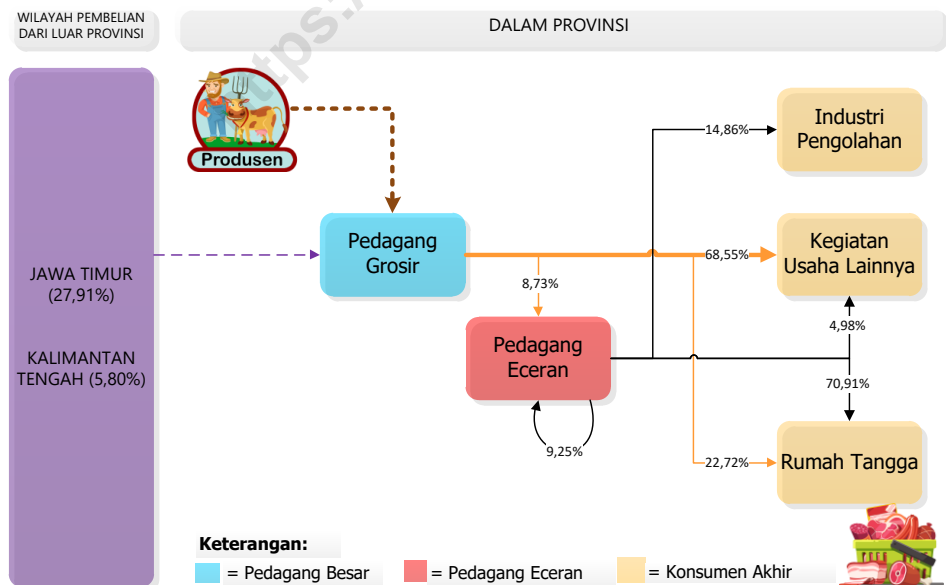
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 15,30 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 15,30 persen.

3.22 Provinsi Kalimantan Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Pontianak.

3.22.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Kalimantan Barat melibatkan pedagang grosir dan pedagang eceran.



Gambar 29. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Gambar 28, dapat dilihat bahwa pedagang eceran mayoritas menjual stok daging sapi ke kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga, sedangkan sebagian kecil lainnya ke pedagang eceran. Oleh pedagang eceran, sebagian besar pasokan tersebut kemudian dijual ke rumah tangga (70,91 persen). Sementara itu, dari data pembelian, didapatkan informasi tambahan bahwa pedagang grosir menerima pasokan dari produsen.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang grosir sebelum akhirnya berujung ke konsumen akhir yaitu kegiatan usaha lainnya.

3.22.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

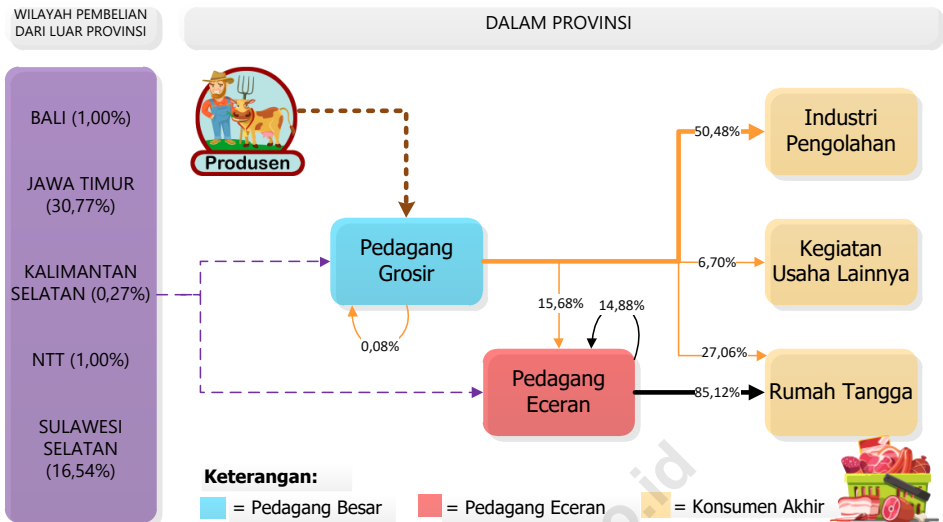
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 21,36 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 21,36 persen.

3.23 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya.

3.23.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan beberapa lembaga usaha perdagangan seperti pedagang grosir dan pedagang eceran.



Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Tengah

Dari Gambar 29 dapat dilihat bahwa secara garis besar ada dua jalur perdagangan yang muncul, yakni jalur yang berawal dari produsen dan jalur yang berawal dari provinsi lain. Untuk jalur provinsi lain, dari data pembelian diperoleh informasi bahwa provinsi tersebut menjual stok daging sapi ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara itu, untuk jalur dari produsen, seluruh produksi daging sapi didistribusikan ke pedagang grosir. Suplai dari pedagang grosir tersebut kemudian diteruskan ke konsumen akhir dengan persentase terbesar ke industri pengolahan (50,48%).

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Kalimantan Tengah dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir (industri pengolahan) terjadi dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang grosir. Namun, pola utama tersebut berpotensi menjadi tiga mata rantai ketika melibatkan keberadaan pedagang eceran didalamnya.

3.23.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

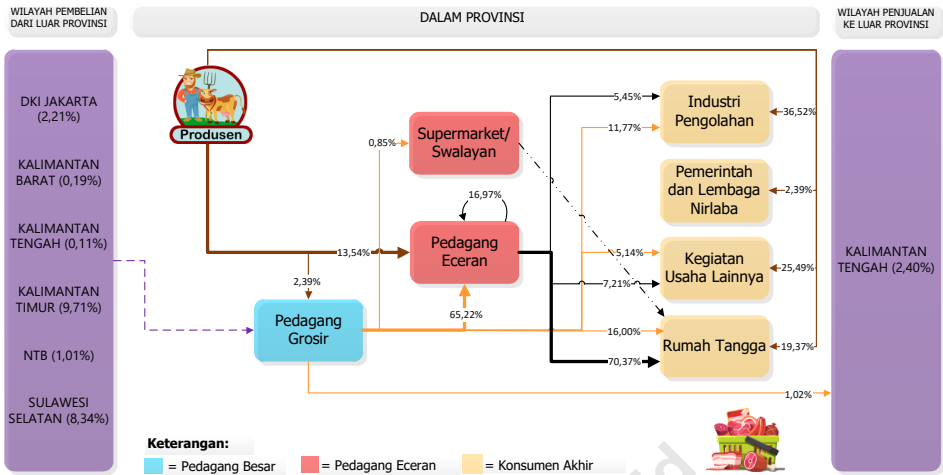
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 21,92 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 21,92 persen.

3.24 Provinsi Kalimantan Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

3.24.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Kalimantan Selatan terlihat cukup sederhana. Praktis hanya pedagang grosir dan pedagang eceran saja yang menjembatani pasokan daging sapi dari produsen hingga konsumen. Dari Gambar 30, tampak bahwa produsen memiliki kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan konsumen akhir karena hampir 85 persen hasil produksinya dijual secara langsung ke konsumen akhir. Selain itu, produsen juga menyuplai daging sapi ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Oleh pedagang eceran, mayoritas stok daging sapi dijual guna memenuhi permintaan rumah tangga (70,37 persen). Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 31. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Selatan

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.24.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

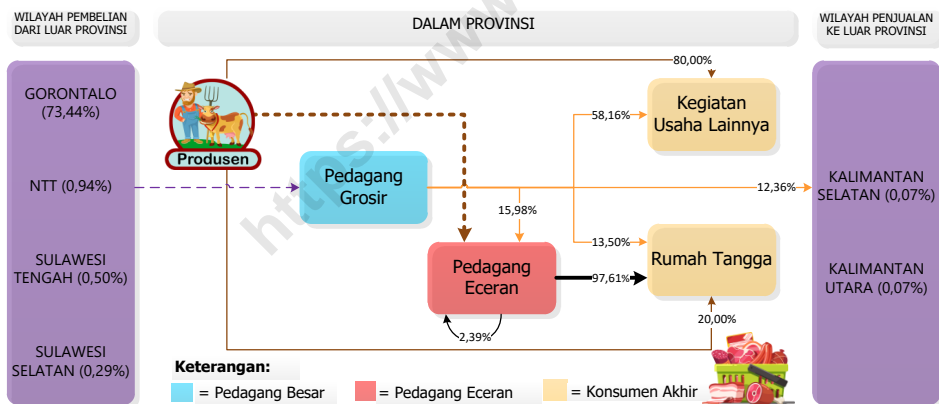
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 19,87 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 19,87 persen.

3.25 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

3.25.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur tergolong cukup efisien. Untuk level pedagang besar, hanya pedagang grosir yang turut berperan dalam pendistribusian daging sapi di provinsi ini. Dari Gambar 31 tampak bahwa pasokan daging sapi yang beredar, selain bergantung pada hasil produksi dari produsen setempat, juga bergantung pada pasokan dari provinsi lain. Data survei menunjukkan bahwa produsen memiliki kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan konsumen akhir. Sedangkan hasil produksi yang diterima dari provinsi lain diteruskan oleh pedagang eceran ke konsumen akhir seperti rumah tangga dan industri pengolahan, serta sebagian ke pedagang eceran. Selain itu, dari data pembelian diketahui bahwa pedagang eceran juga menerima pasokan daging sapi dari produsen, sebelum akhirnya dipasarkan ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 32. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Timur

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.25.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

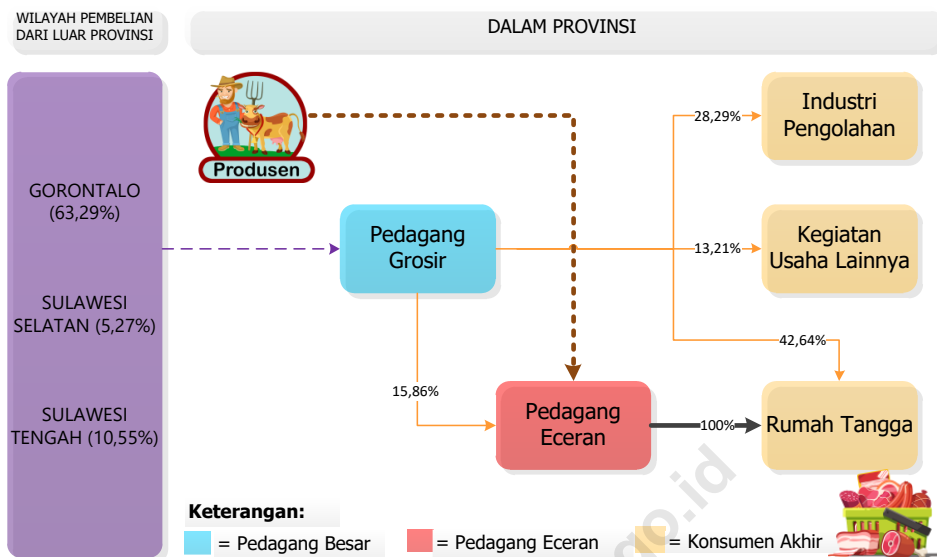
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 14,22 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 14,22 persen.

3.26 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

3.26.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Kalimantan Utara melibatkan beberapa lembaga usaha perdagangan seperti pedagang grosir dan pedagang eceran. Dari data pembelian dapat dilihat bahwa pedagang eceran mendapatkan stok daging sapi melalui produsen. Oleh pedagang eceran, seluruh pasokan tersebut kemudian dijual ke rumah tangga. Sementara itu, didapatkan informasi tambahan bahwa pedagang grosir menerima pasokan daging sapi dari provinsi lain. Kemudian pedagang grosir tersebut mendistribusikan stok daging sapi ke pedagang eceran, serta untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen akhir.



Gambar 33. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Utara

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk di Kalimantan Timur dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.26.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

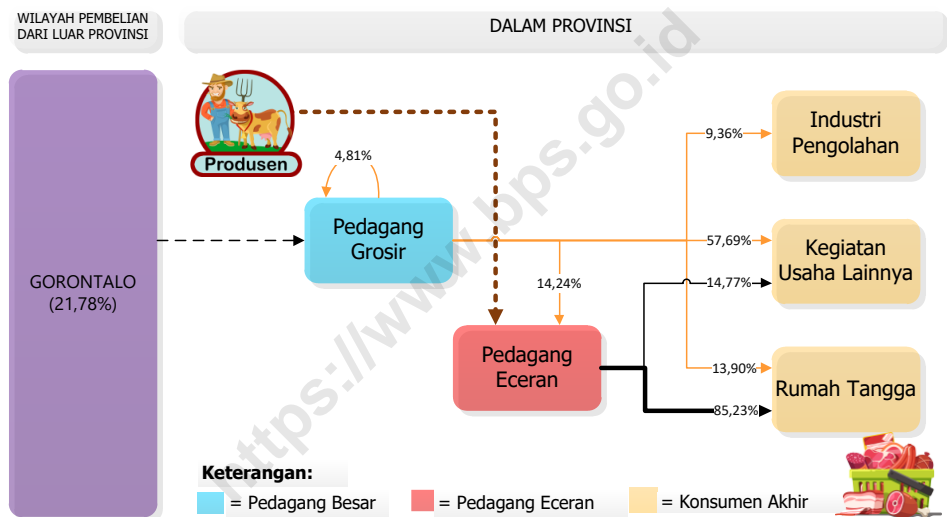
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 20,00 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 20,00 persen.

3.27 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Kotamobagu.

3.27.1 Pola Distribusi

Hasil survei memberikan gambaran bahwa pola distribusi daging sapi di Provinsi Sulawesi Utara melibatkan beberapa fungsi kelembagaan seperti pedagang grosir dan pedagang eceran.



Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Utara

Secara umum, pedagang grosir memegang peran vital dalam pendistribusian daging sapi di provinsi ini. Dari Gambar 33 tampak bahwa pasokan daging sapi yang beredar cukup bergantung pada pasokan dari luar provinsi melalui pedagang grosir. Selain itu, dari data pembelian menunjukkan bahwa daging sapi yang diterima oleh pedagang eceran sebagian berasal dari produsen, yang kemudian oleh pedagang eceran pasokan tersebut diteruskan ke konsumen akhir seperti rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang eceran sebagai perantara antara produsen dan konsumen akhir. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.27.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

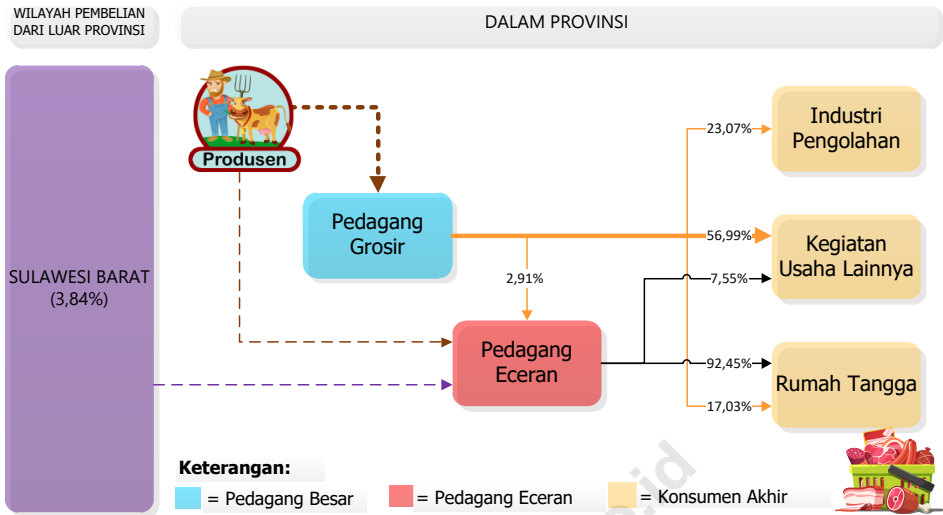
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 16,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 16,57 persen.

3.28 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi dan Kota Palu.

3.28.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Sulawesi Tengah melibatkan beberapa fungsi kelembagaan seperti pedagang grosir dan pedagang eceran. Praktis pola yang terbentuk cukup ringkas. Informasi dari data pembelian menjelaskan bahwa setelah pedagang grosir dan pedagang eceran menerima pasokan dari produsen, kedua pedagang tersebut langsung menyalurkan sebagian besar pasokannya ke konsumen akhir. Data survei mencata bahwa pedagang grosir fokus memasok stok daging sapi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usaha lain (restoran, warung/kedai makan, perhotelan dll). Selain itu, pedagang grosir juga memasok 2,91 persen ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual kembali sebagian besar pasokan daging sapi yang dibelinya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 35. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Tengah

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Sulawesi Tengah dari produsen sampai dengan konsumen akhir (kegiatan usaha lain) yang terbentuk hanya melibatkan satu perantara saja yaitu pedagang grosir.

3.28.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 11,54 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 11,54 persen.

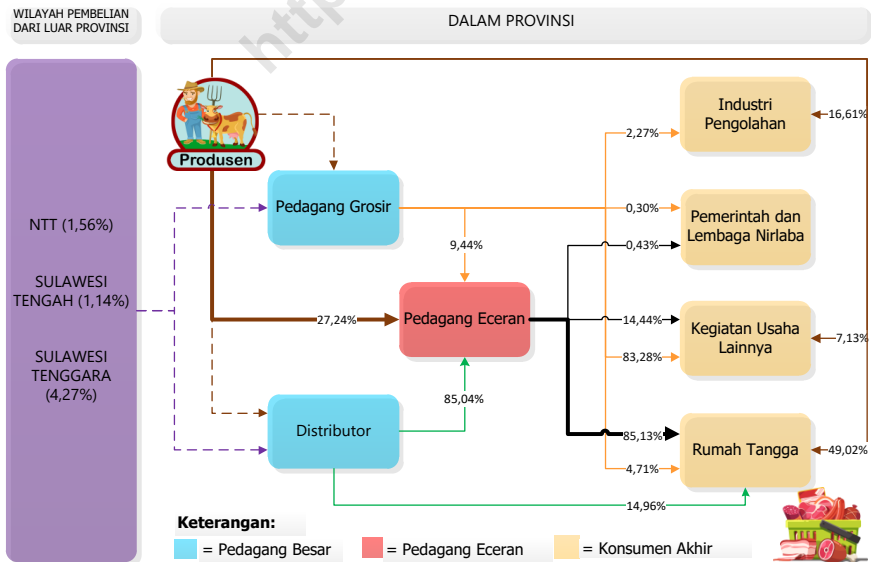
3.29 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten

Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar dan Kota Parepare.

3.29.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan cukup banyak lembaga usaha perdagangan seperti distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Data survei menggambarkan bahwa pendistribusian daging sapi di provinsi potensial produksi ini lebih didominasi oleh kontribusi dari produsen lokal, walaupun ada sedikit pasokan dari luar provinsi. Produsen menjual sekitar 27,24 persen pasokannya ke pedagang eceran dan 49,02 persen ke rumah tangga, serta sisanya terbagi habis masing-masing ke industry pengolahan (16,61 persen) dan juga kegiatan usaha lainnya (7,13 persen). Sementara itu, dari data pembelian, didapatkan informasi tambahan bahwa pedagang grosir turut menerima pasokan dari produsen, untuk kemudian dipasarkan ke pedagang eceran dan konsumen akhir. Di akhir mata rantai distribusi, pedagang eceran menjual mayoritas stok daging sapi ke rumah tangga (85,13 persen). Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 36. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Selatan

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.29.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 12,04 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 12,04 persen.

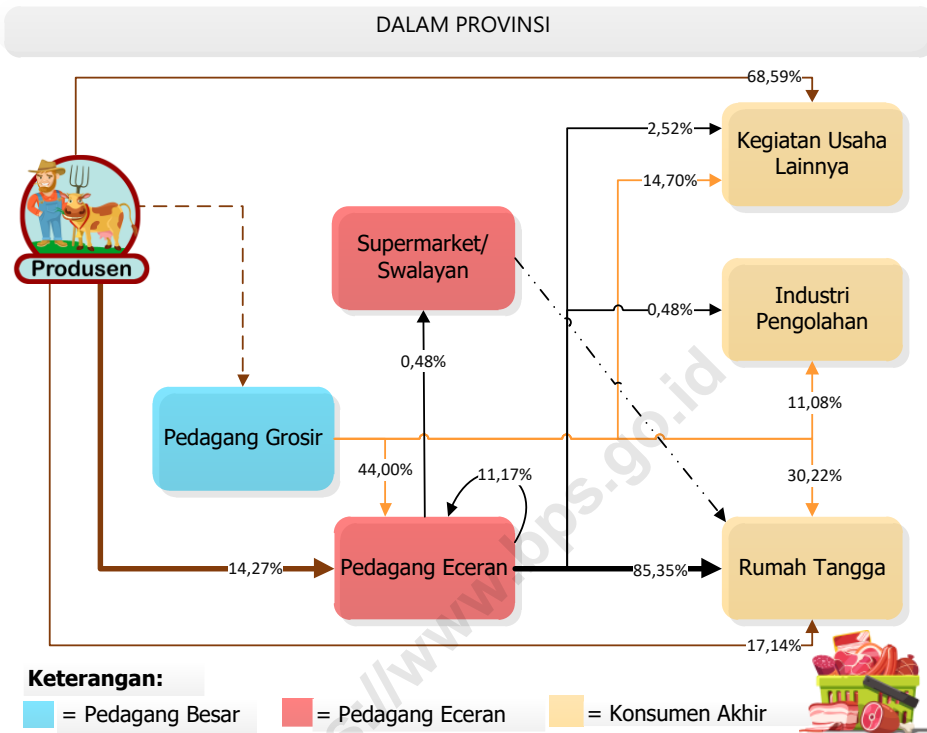
3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari dan Kota Bau-Bau.

3.30.1 Pola Distribusi

Hasil survei menggambarkan bahwa pola distribusi daging sapi di Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong cukup sederhana. Praktis hanya pedagang grosir dan pedagang eceran saja yang terlibat dalam menjembatani suplai daging sapi dari produsen ke konsumen akhir. Dari Gambar 36 juga tampak pola sentral dari produsen setempat dalam menyuplai daging sapi baik ke pedagang maupun ke konsumen akhir terutama kegiatan usaha lain. Sementara itu, dari data pembelian, didapatkan informasi tambahan bahwa pedagang grosir yang menerima pasokan dari produsen juga menjual sebagian besar pasokannya ke pedagang eceran. Di level pengecer, pedagang eceran menjual mayoritas stok daging sapi ke rumah

tangga (85,35 persen). Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 37. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Tenggara

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut.

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terbentuk dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang eceran. Namun, pendistribusian tersebut berpotensi menjadi sedikit lebih panjang ketika melalui jalur : produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – rumah tangga.

3.30.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

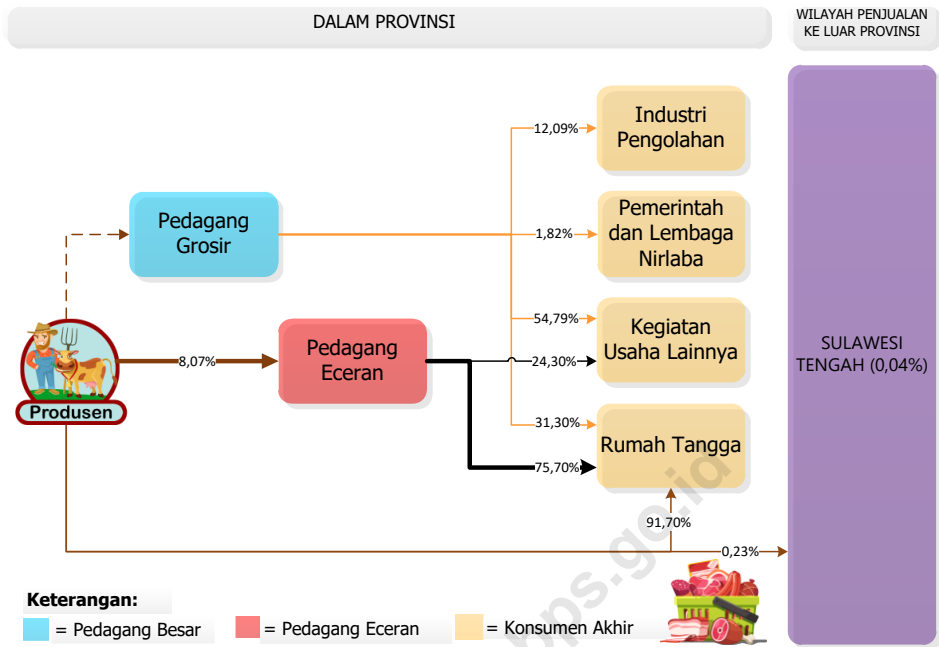
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 17,37 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 17,37 persen.

3.31 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi meliputi Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.

3.31.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Gorontalo melibatkan beberapa fungsi kelembagaan usaha seperti pedagang grosir dan pedagang eceran. Pendistribusian daging sapi berawal dari produsen yang menjual lebih dari 90 persen hasil produksinya langsung ke konsumen akhir, dan sisanya ke pedagang eceran. Dari aspek pembelian, didapatkan informasi juga bahwa pedagang grosir juga menerima pasokan daging sapi dari produsen. Baik pedagang grosir maupun pedagang eceran sama-sama menyalurkan pasokan daging sapi langsung ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Gorontalo secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Gorontalo

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Gorontalo dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk di Provinsi Gorontalo dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang eceran.

3.31.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

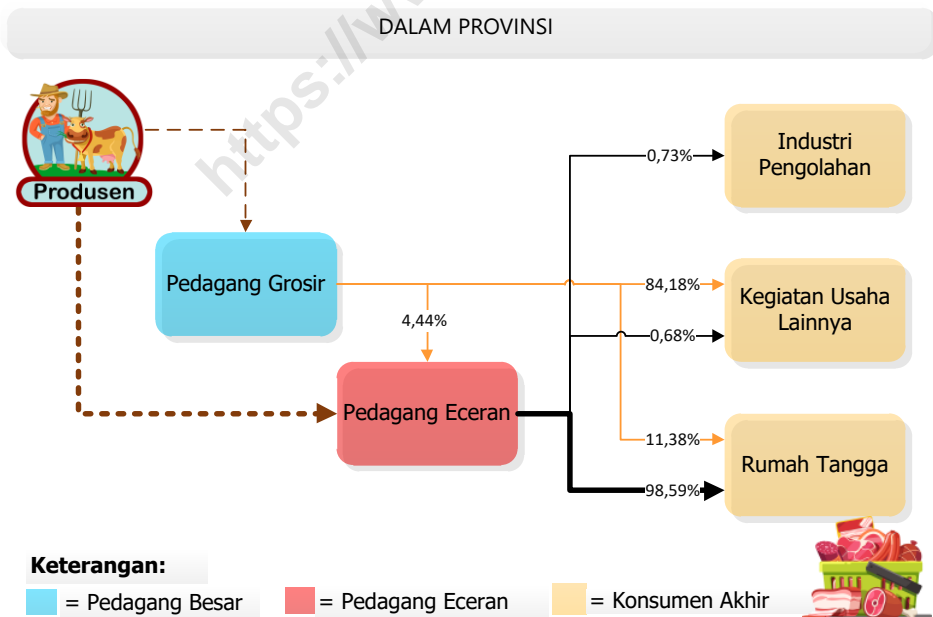
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 13,55 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 13,55 persen.

3.32 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara.

3.32.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Sulawesi Barat melibatkan dua fungsi kelembagaan usaha saja yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Dari informasi data pembelian, pedagang grosir dan pedagang eceran mengaku menerima pasokan daging dari produsen. Di level pedagang grosir, sebagian besar pasokan daging sapi didistribusikan untuk memenuhi permintaan dari kegiatan usaha lain. Sedangkan di level pengecer, mayoritas stok yang ada didistribusikan ke rumah tangga (98,59 persen). Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Sulawesi Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 39. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Barat

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sulawesi Barat dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.32.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

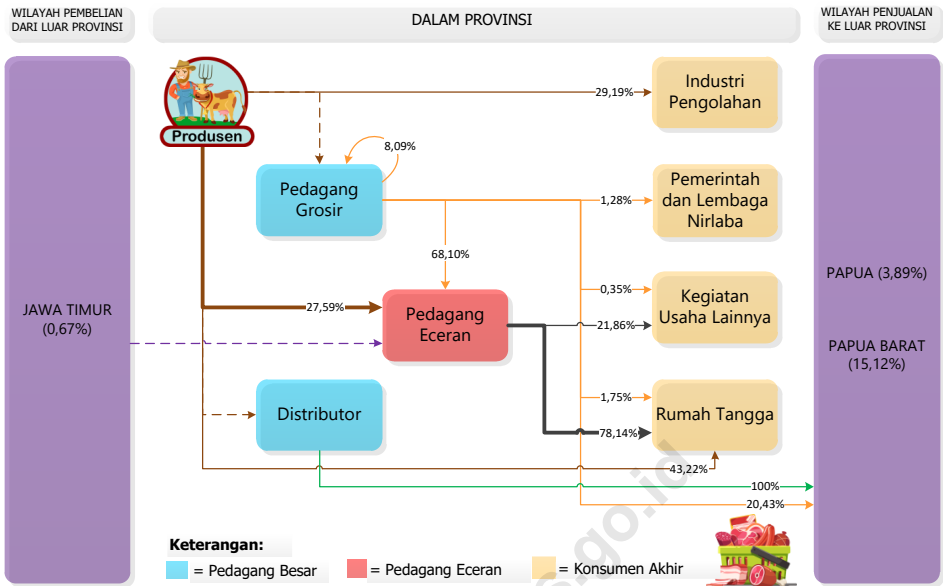
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 21,99 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 21,99 persen.

3.33 Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kota Ambon, dan Kota Tual.

3.33.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa pola distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Maluku dimulai dari produsen yang memasok sekitar 27,59 persen hasil produksinya ke pedagang eceran. Selain itu, produsen juga menjual hasil produksinya langsung ke konsumen akhir. Dari data pembelian, didapatkan informasi pendukung bahwa distributor dan pedagang grosir juga menerima pasokan dari produsen. Oleh pedagang grosir pasokan tersebut diteruskan ke pedagang eceran (68,10 persen) dan juga konsumen akhir. Sedangkan distributor lebih focus menjual pasokan daging sapi ke provinsi lain. Lebih lanjut, pada hilir distribusi pedagang eceran yang menerima pasokan dari produsen dan pedagang grosir menjual sebagian besar daging sapi ke rumah tangga, dan sebagian sisanya ke kegiatan usaha lain. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Maluku secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 40. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Maluku

Dari pola yang terbentuk, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.33.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

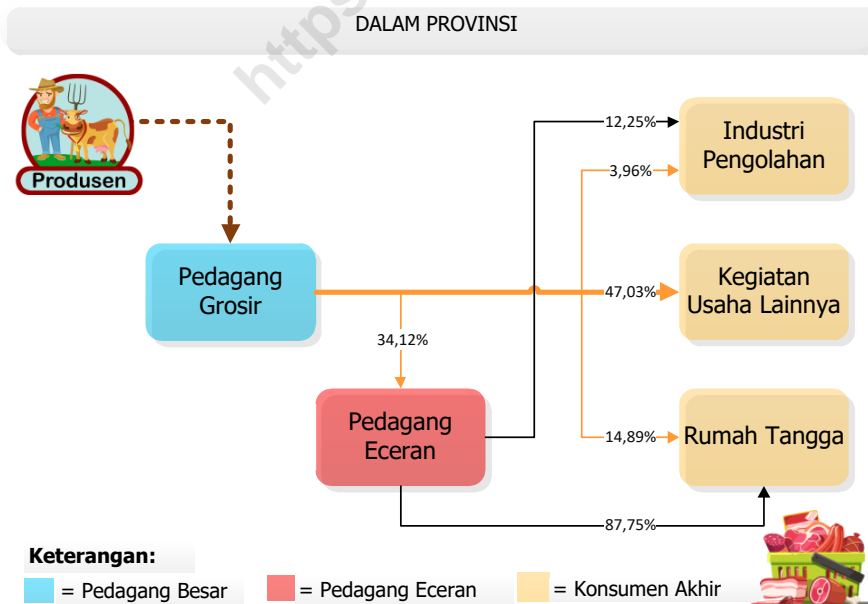
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Maluku adalah sebesar 16,21 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 16,21 persen.

3.34 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kota Ternate.

3.34.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi perdagangan daging sapi di provinsi Maluku Utara tergolong cukup sederhana. Praktis hanya pedagang grosir dan pedagang eceran yang terlibat dalam pendistribusian daging sapi dari produsen ke konsumen akhir. Dari data pembelian didapatkan informasi bahwa setelah mendapatkan pasokan daging sapi dari produsen, pedagang grosir menyalurkan pasokannya ke pedagang eceran, serta secara langsung ke konsumen akhir. Pasokan dari pedagang grosir cenderung dijual untuk memenuhi kebutuhan dari kegiatan usaha lain, sedangkan pasokan dari pedagang eceran mayoritasnya dijual ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Maluku Utara secara lengkap disajikan pada Gambar 40.



Gambar 41. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Maluku Utara

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Maluku Utara dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terbentuk dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang grosir. Sementara konsumen akhirnya adalah kegiatan usaha lainnya.

3.34.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

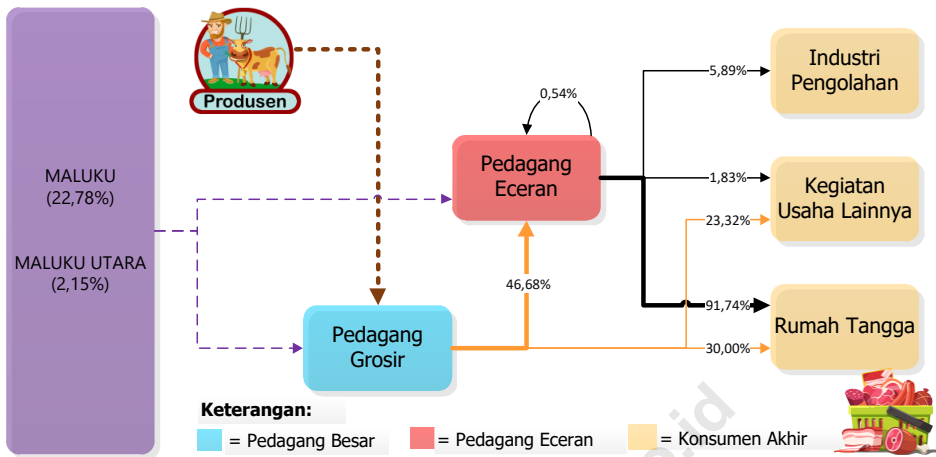
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 10,95 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 10,95 persen.

3.35 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

3.35.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Papua Barat melibatkan dua fungsi lembaga usaha saja yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Dari informasi data pembelian, pedagang grosir mendapat pasokan daging dari produsen serta sedikit tambahan dari luar provinsi. Di level pedagang grosir, sebagian besar pasokan daging sapi didistribusikan ke pedagang eceran (46,68 persen). Kemudian, pengecer yang menerima stok dari pedagang grosir menjual mayoritas stoknya ke rumah tangga (91,74 persen). Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Papua Barat secara lengkap disajikan pada Gambar 41.



Gambar 42. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Papua Barat

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Papua Barat dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan dua pihak perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga. Rantai utama tersebut juga merupakan rantai distribusi terpanjang yang mungkin terjadi di provinsi ini.

3.35.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

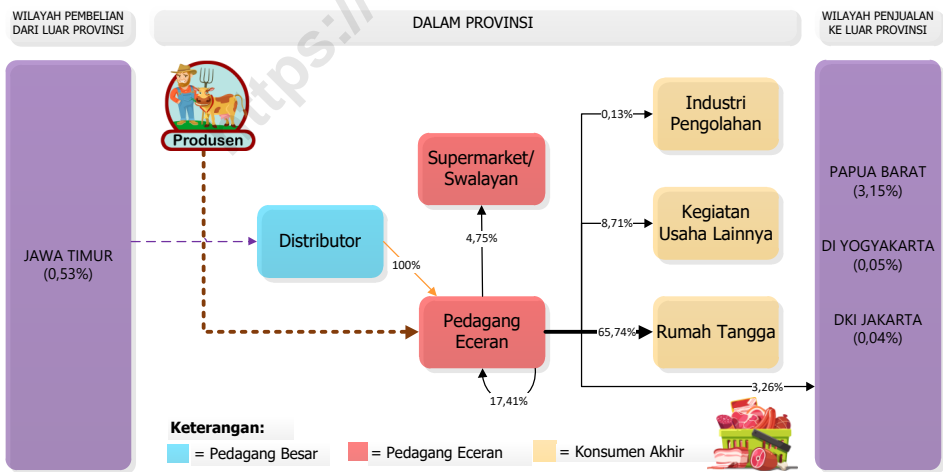
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 37,27 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 37,27 persen.

3.36 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten dan Kota Jayapura.

3.36.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa pola distribusi perdagangan di Provinsi Papua tergolong cukup sederhana. Berawal dari pedagang eceran yang mendapatkan pasokan daging sapi dari produsen, kemudian menjual sebagian besar daging sapi ke sesama pedagang eceran dan rumah tangga. Sementara sebagian kecil sisanya industri pengolahan dan juga kegiatan usaha lainnya. Disamping itu, distributor yang mendapat pasokan dari luar provinsi turut menyuplai pasokan daging sapi ke pedagang eceran. Pada pola distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Papua tidak ditemukan adanya pedagang grosir. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Papua secara lengkap disajikan pada Gambar 42.



Gambar 43. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Papua

Berdasarkan pola distribusi perdagangan yang terbentuk, pola utama distribusi perdagangan daging sapi adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.36.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Papua adalah sebesar 19,46 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua adalah sebesar 19,46 persen.

BAB IV

KESIMPULAN

Hasil survei menunjukkan bahwa pola utama pendistribusian daging sapi di Indonesia memiliki dua jalur, yaitu jalur produsen dan jalur importir. Untuk jalur produsen, pola utama distribusi daging sapi memiliki tiga rantai yaitu: produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Begitu pula untuk jalur importir, pola utama distribusi daging sapi memiliki tiga rantai yaitu: importir – distributor – pedagang eceran – konsumen akhir. Akan tetapi, jalur distribusi dari importir ini berpotensi menjadi lebih panjang ketika melibatkan pedagang besar lainnya di dalam pendistribusiannya.

Jika dilihat per provinsi, mayoritas pola utama rantai distribusi daging sapi di Indonesia tergolong cukup pendek. Dari 34 provinsi, 30 diantaranya memiliki pola utama distribusi yang hanya melalui dua rantai. Pendistribusian pola utama tersebut melibatkan satu pedagang perantara baik yang berperan sebagai pedagang grosir maupun sebagai pedagang eceran.

Pasokan daging yang diperdagangkan tidak hanya bersumber dari daging sapi domestik. Hasil survei juga menangkap ada pasokan daging yang didatangkan dari luar negeri. Hal tersebut membuat provinsi-provinsi seperti Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memiliki pola distribusi yang berawal dari jalur importir.

Dalam skala nasional, perolehan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) total komoditas daging sapi adalah 34,11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 34,11 persen. Secara spasial, Bengkulu merupakan provinsi dengan perolehan MPP tertinggi yaitu sebesar 56,54 persen. Sementara Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan MPP terendah yaitu sebesar 7,94 persen.

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Ariningsih, Ening. (2014). *Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Agustinus, Michael. *Soal Kebutuhan Daging Sapi, Kementan dan Kantor Menko Perekonomian Beda Data*. Dikutip dari www.finance.detik.com, pada 25 Oktober 2017.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta.
- (2017). *Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2017, Berdasarkan Hasil Susenas September*. Jakarta.
- (2017). *Statistik Pemotongan Ternak 2017*. Jakarta.
- (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. (2015). *Outlook Komoditas Pertanian Sub Sektor Peternakan Komoditas Daging Sapi*. Jakarta : Pusdatin Sekjen Kementerian Pertanian.
- Mahbubi, Akhmad. (2014). *Optimasi Pengelolaan Rantai Pasok Daging Sapi dari Nusa Tenggara Timur ke DKI Jakarta*. Jakarta: Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wamaer, Demas dan Kuntoro Boga Andri. (2016). *Tinjauan Produksi dan Konsumsi Daging Sapi pada Era Otonomi Khusus di Provinsi Papua*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum: Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 Edisi Mei.

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 1: Daftar VPDP17

RAHASIA



VPDP-18

**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
TAHUN 2018**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

 (disalin dari DSPU)

BLOK I: KETERANGAN USAHA	
(1)	(2)
1. Provinsi	<input type="text"/>
2. Kabupaten/Kota ⁽¹⁾	<input type="text"/>
3. Kecamatan	<input type="text"/>
4. Kelurahan/Desa ⁽¹⁾	<input type="text"/>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha	<input type="text"/>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha	<input type="text"/>
7. Alamat Perusahaan/Usaha	<input type="text"/>
Kode pos : <input type="text"/>	
Nomor Telepon : (.....)	Ext:
E-mail:	Nomor Fax:
	Website:

(1) contoh yang tidak sesuai/

- Tujuan Survei** :
- Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
 - Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
 - Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.
- Dasar Hukum** : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Kerahasiaan** : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 21.
- Kewajiban** : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri
 Jl. Dr Sutomo No. 6-5, Jakarta 10710
 Telepon: (021) 3610291-4, 3541195, 3542500 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 366 3815. Email : statpdn@bps.go.id
 atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:

BLOK II: KETERANGAN UMUM																	
(Jenis komoditas yang diteliti harus ditentukan oleh petugas BPS)																	
(I)	(II)																
<p>1. Kegiatan utama usaha/perusahaan tahun 2017:</p> <p>2. Rata-rata banyaknya tenaga kerja per bulan pada tahun 2017: orang</p> <p>3. Badan Usaha: 1. PT 2. CV 3. Koperasi 4. Ijin Khusus 5. Tidak Berbadan Usaha</p> <p>4. Komoditas yang diteliti: 1. Beras Medium 3. Bawang Merah 5. Daging Ayam Ras 7. Gula Pasir 2. Cabai Merah 4. Daging Sapi 6. Telur Ayam Ras 8. Minyak Goreng</p> <p>5. a. Apakah memiliki ijin khusus dalam menjalankan usaha dari instansi terkait? 1. Ya 2. Tidak b. Jika "Ya" (Rincian Sa kode 1), maka ijin usaha adalah sebagai: 1. Produsen 4. Agen 7. Swalayan/Supermarket 2. Distributor 5. Sub Agen 8. Eksportir 3. Sub distributor 6. Pedagang grosir 9. Importir</p> <p>6. Apakah komoditas yang dijual adalah produksi sendiri (produsen)? 1. Ya 2. Tidak</p> <p>7. Jika R4 berkode 2, 3 atau 6, apakah dalam melakukan pembelian komoditas aktif mendalang petani/peternak? 1. Ya 2. Tidak</p> <p>8. Apakah memiliki/menguasai gudang yang terdaftar? 1. Ya 2. Tidak</p> <p>9. Apakah menjalankan usaha berdasarkan sistem komisi? 1. Ya 2. Tidak</p>	<p>KBLI 2015</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p>diteliti pada tahun</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																
Blok III s.d. Blok VI, berkaitan dengan komoditas pada Rincian 4.																	

BLOK III: WILAYAH DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
1. Wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2017:					
No.	Provinsi/Negara	Kode ³⁾	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp)	Biaya Transportasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.				%	
b.				%	
c.				%	
d.				%	
e.				%	
f.				%	
g.				%	
Jumlah			1 0 0	%	
3) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa					
2. Wilayah penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2017:					
No.	Provinsi/Negara	Kode ³⁾	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp)	Biaya Transportasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.				%	
b.				%	
c.				%	
d.				%	
e.				%	
f.				%	
g.				%	
Jumlah			1 0 0	%	
3) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa					

BLOK IV: RANTAI DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Pembelian barang dagangan selama tahun 2017:

No.	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dalam provinsi		
	a. Importir	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	b. Produsen	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	c. Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	d. Sub distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	e. Agen	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	f. Pedagang grosir	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	g. Pedagang pengepul	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	h. Pedagang eceran	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	i. Petani/Peternak	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
2.	Luar provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
3.	Luar negeri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	Jumlah	1 0 0 %	

2. Penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2017:

No.	Tujuan penjualan barang dagangan/hasil produksi	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dalam provinsi		
	a. Eksportir	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	b. Distributor	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	c. Sub distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	d. Agen	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	e. Pedagang grosir	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	f. Pedagang pengepul	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	g. Supermarket/walayan	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	h. Pedagang eceran	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	i. Industri pengolahan	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	j. Kegiatan usaha lainnya	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	k. Pemerintah dan lembaga nirlaba	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	l. Rumah tangga	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
2.	Luar provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
3.	Luar negeri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	Jumlah	1 0 0 %	

RINCIAN INI DIISI OLEH PEMERIKSA

3. Berdasarkan asal pembelian dan tujuan penjualan(Blok IV Rincian 1 dan 2) dan indikator pelaku usaha (Blok II Rincian 6 s.d. Rincian 9), usaha/perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai:

- | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Produsen | 4. Sub distributor | 7. Pedagang eceran |
| 2. Pedagang pengepul | 5. Agen | 8. Eksportir |
| 3. Distributor | 6. Pedagang grosir | 9. Importir |

ditai oleh pemeriksa

BLOK V: NERACA PERDAGANGAN												
1. Pembelian dan penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2017:												
Uraian				Volume				Satuan¹⁾				
(a)				(b)				(c)				
a. Stok Awal (siswa 2016)							kg / kw / ton				
d. Pembelian barang dagangan / Produksi ¹⁾							kg / kw / ton				
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain							kg / kw / ton				
d. Hilang/rusak							kg / kw / ton				
e. Penjualan							kg / kw / ton				
f. Stok Akhir (siswa 2017)							kg / kw / ton				
<small>1) Coret yang tidak sesuai</small>												
2. Berapa persen nilai penjualan komoditas yang diteliti terhadap seluruh nilai penjualan selama tahun 2017?											<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
3. Selama tahun 2017, produksi/penjualan komoditas terjadi pada bulan: (beri tanda ✓)												
Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
4. a. Selama tahun 2017 rata-rata harga komoditas yang diproduksi/dijual dibanding tahun sebelumnya												
Lebih murah 1 → ke R2b				Lebih mahal 2 → ke R2c				Sama saja 3 → ke Blok VI				
b. Jika lebih murah, faktor utama penyebabnya:												
Produksi banyak 1				Ada operasi pasar 3								
Ada impor 2				Lainnya (tuliskan:)				4				
c. Jika lebih mahal, faktor utama penyebabnya:												
Produksi kurang 1				Faktor cuaca 3								
Tidak ada impor/operasi pasar 2				Lainnya (tuliskan:)				4				
BLOK VI: CATATAN												
BLOK VII: KETERANGAN PETUGAS DAN PEMBERI JAWABAN												
URAIAN		PENCACAH			FEMERKSA			PEMBERI JAWABAN				
(a)		(b)			(c)			(d)				
1. Nama					
2. Telepon					
3. Tanggal	 s.d. s.d. s.d.				
4. Tanda tangan					

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Jl Dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710
Kotak Pos 1003, Jakarta 10010
Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 - 5/Fax: 021-3857048
E-mail: bpsHQ@bps.go.id
Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISBN 978-602-438-261-2



9 786024 382612